BADAN POM

2026

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TRIWULAN I TAHUN 2026

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Jakarta
2026

2026

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

TRIWULAN I TAHUN 2026

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Jakarta
2026

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik Badan POM Triwulan I Tahun 2026 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja Deputi II BPOM pada Triwulan I Tahun 2026, serta merupakan implementasi dari prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi, dan akuntabilitas kinerja sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), serta Pedoman SAKIP Badan POM yang terbaru.

Dalam penyusunan LAKIP ini, kinerja Deputi II BPOM diukur berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan mengacu pada dokumen Rencana Strategis Deputi II BPOM Tahun 2025–2029. Laporan ini memuat capaian indikator kinerja utama, analisis atas hasil yang diperoleh, serta identifikasi kendala dan langkah tindak lanjut untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas ke depan.

Kami menyadari bahwa dalam proses penyelenggaraan kinerja, masih terdapat berbagai tantangan dan ruang untuk perbaikan. Oleh karena itu, melalui laporan ini, kami berkomitmen untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan guna mendukung peningkatan kinerja pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik, serta memperkuat kontribusi terhadap perlindungan kesehatan masyarakat.

Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan program dan kegiatan Deputi II BPOM selama Triwulan I Tahun 2026, serta dalam penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai akuntabilitas kinerja Deputi II BPOM dan menjadi dasar perbaikan serta peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jakarta, 27 April 2026

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Mohamad Kashuri

Executive Summary

Pada Triwulan I Tahun 2026, Deputi II BPOM melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan di bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dengan berpedoman pada sasaran strategis yang tertuang dalam rencana kinerja. Kinerja organisasi diukur melalui 24 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK), di mana pada periode ini 15 indikator telah dapat diukur, sementara 9 indikator lainnya belum dapat diukur karena masih berada pada tahap awal pelaksanaan kegiatan. Berdasarkan hasil pengukuran, Deputi II BPOM memperoleh Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 89,77 dengan predikat “Baik”, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan pada awal tahun telah berjalan efektif dan berada pada jalur yang tepat untuk mencapai target tahunan.

Capaian kinerja menunjukkan hasil yang cukup menggembirakan, dengan sebagian indikator bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator dengan capaian sangat baik antara lain persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu (103,53%), suplemen kesehatan yang aman dan bermutu (119,20%), serta fasilitas distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan (di atas 100%). Selain itu, indikator terkait inovasi obat bahan alam dan pemberdayaan UMKM juga menunjukkan capaian yang melampaui target. Hal ini mencerminkan efektivitas implementasi pengawasan berbasis risiko, penguatan pembinaan pelaku usaha, serta optimalisasi layanan regulatory assistance.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target optimal, seperti pengawasan sarana produksi, pengawasan iklan, serta tindak lanjut rekomendasi lintas sektor. Kendala yang dihadapi antara lain masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar produksi dan distribusi, tingginya pelanggaran iklan di media digital, keterbatasan koordinasi lintas sektor dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, serta belum optimalnya pemerataan pelaksanaan sampling oleh UPT. Selain itu, beberapa indikator belum dapat diukur karena kegiatan masih dalam tahap perencanaan dan persiapan pelaksanaan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Deputi II BPOM memiliki pagu efektif sebesar Rp21.495.552.000, dengan realisasi hingga Triwulan I sebesar Rp3.791.621.585 (17,64%). Tingkat serapan ini masih relatif rendah karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap awal pelaksanaan, termasuk proses perencanaan teknis, pengadaan, dan penjadwalan kegiatan. Meskipun demikian, tidak terdapat kendala signifikan dalam pengelolaan anggaran, dan telah dilakukan langkah-langkah percepatan untuk meningkatkan realisasi pada triwulan berikutnya.

Secara keseluruhan, kinerja Deputi II BPOM pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kondisi yang stabil dan positif, baik dari sisi capaian indikator maupun pengelolaan anggaran. Untuk meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan, penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan pembinaan dan literasi pelaku usaha, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dan sistem monitoring kinerja. Dengan strategi tersebut, diharapkan seluruh indikator kinerja dapat tercapai secara optimal pada akhir tahun serta mendukung terwujudnya sistem pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Highlight Kinerja

Pada Triwulan I Tahun 2026, Deputi II BPOM menunjukkan kinerja yang stabil dan positif dalam pelaksanaan pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik. Hal ini tercermin dari capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 89,77 dengan predikat "Baik", yang menunjukkan bahwa sebagian besar indikator kinerja telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan beberapa indikator berhasil melampaui target sejak awal tahun.

Salah satu highlight utama adalah capaian pada aspek pengawasan produk, di mana indikator persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu mencapai 103,53%, serta suplemen kesehatan yang aman dan bermutu mencapai 119,20%. Capaian ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan berbasis risiko, intensifikasi sampling dan pengujian, serta meningkatnya kepatuhan pelaku usaha dalam menjaga kualitas produk. Selain itu, pada komoditas kosmetik, capaian sebesar 96,29% menunjukkan bahwa pengawasan tetap berjalan baik meskipun masih terdapat ruang perbaikan.

Pada aspek pengawasan distribusi, kinerja juga menunjukkan hasil yang sangat baik. Indikator fasilitas distribusi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan masing-masing mencapai 109,26% dan 101,20%, yang mencerminkan tingginya tingkat kepatuhan pelaku usaha distribusi serta efektivitas pelaksanaan inspeksi di lapangan. Hal ini menjadi indikator penting dalam menjamin mutu produk yang beredar hingga ke konsumen.

Dari sisi penguatan industri dan inovasi, capaian indikator persentase inovasi Obat Bahan Alam yang didampingi sesuai standar mencapai 100,10%, serta persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu mencapai 104,25%. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa layanan regulatory assistance, pendampingan teknis, serta program pemberdayaan pelaku usaha telah berjalan efektif dalam meningkatkan kapasitas industri, khususnya UMKM, untuk memenuhi standar yang dipersyaratkan.

Meskipun demikian, terdapat beberapa indikator yang masih perlu menjadi perhatian, antara lain pada pengawasan sarana produksi, pengawasan iklan, dan tindak lanjut rekomendasi lintas sektor, yang masih berada pada kategori cukup atau belum optimal. Tantangan yang dihadapi antara lain masih rendahnya kepatuhan sebagian pelaku usaha, tingginya dinamika promosi di media digital, serta kompleksitas koordinasi lintas sektor. Selain itu, beberapa indikator belum dapat diukur pada Triwulan I karena masih berada pada tahap awal pelaksanaan kegiatan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi hingga Triwulan I mencapai 17,64% dari pagu efektif Rp21,49 miliar, yang menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran masih berada pada fase awal. Hal ini sejalan dengan siklus pelaksanaan kegiatan pemerintah, di mana sebagian besar kegiatan strategis akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya. Meskipun demikian, tidak terdapat kendala signifikan dalam pengelolaan anggaran, dan telah dilakukan langkah percepatan untuk mendukung pencapaian target kinerja.

Secara keseluruhan, highlight kinerja Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Deputi II BPOM telah berada pada jalur yang tepat dalam mencapai target kinerja tahunan. Keberhasilan pada beberapa indikator strategis menjadi fondasi yang kuat untuk peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya, dengan tetap memperhatikan area yang masih memerlukan penguatan dan perbaikan secara berkelanjutan.

Daftar Isi

Isi

Kata Pengantar i

Executive Summary ii

Highlight Kinerja iii

Daftar Isi v

Daftar Tabel vi

Daftar Gambar viii

BAB I - Pendahuluan 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Gambaran Umum Organisasi 1
1.3 Struktur Organisasi Deputi II 4
1.4 Isu Strategis 4

BAB II Perencanaan Kinerja 6

2.1 Uraian Singkat Renstra 6
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 8
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) 9
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 12
2.5. Metode Pengukuran 17

BAB III Akuntabilitas Kinerja 31

3.1 Capaian Kinerja Organisasi 31
3.2 Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi 69
3.3 Realisasi Anggaran 69

BAB IV Penutup 73

Daftar Tabel

Tabel 1 : Sebaran pegawai di Deputi II BPOM 2
Tabel 2 : Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan 3
Tabel 3 : Rencana Kinerja Tahunan 2026 8
Tabel 4 : Perjanjian Kinerja Deputi II Tahun 2026 10
Tabel 5 : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM Tahun 2026 13
Tabel 6 : Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran 26
Tabel 7 : Kategori Tingkat Maturitas 27
Tabel 8 : Kriteria Capaian Indikator Kinerja 28
Tabel 9 : Kriteria Predikat Nilai Kerja Organisasi 29
Tabel 10 : Tingkat Efisiensi 30
Tabel 11 : Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2026 32
Tabel 12 : Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2026 34
Tabel 13 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target Triwulan I Tahun 2026 36
Tabel 14 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap Target Tahun 2026 37
Tabel 15 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Triwulan I 2026 38
Tabel 16 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Tahun 2026 39
Tabel 17 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap target Triwulan I tahun 2026 40
Tabel 18 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap target Tahun 2026 41
Tabel 19 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap target Triwulan I 2026 42
Tabel 20 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap Target Tahun 2026 43
Tabel 21 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan I 2026 45
Tabel 22 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 45
Tabel 23 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan I Tahun 2026 47
Tabel 24 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 48
Tabel 25 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan I Tahun 2026 49
Tabel 26 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 50

Tabel 27 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan I Tahun 2026 51
Tabel 28 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 52
Tabel 29 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Triwulan I tahun 2026 53
Tabel 30 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 54
Tabel 31 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan I Tahun 2026 55
Tabel 32 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 56
Tabel 33 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan I Tahun 2026 58
Tabel 34 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 58
Tabel 35 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan I Tahun 2026 60
Tabel 36 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026 61
Tabel 37 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I Tahun 2026 62
Tabel 38 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap Target Tahun 2026 63
Tabel 39 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap Triwulan I Tahun 2026 64
Tabel 40 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap target tahun 2026 65
Tabel 41 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap target Triwulan I 2026 67
Tabel 42 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap Target Tahun 2026 68
Tabel 43 : Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan 70
Tabel 44 : Pengukuran Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan 71

Daftar Gambar

Gambar 1 : Struktur Organisasi Deputi II BPOM 4

BAB I

PENDAHULUAN

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

BAB I - Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan industri obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik di Indonesia terus menunjukkan tren yang positif, baik dari segi pertumbuhan jumlah produk maupun diversifikasi jenisnya. Di tengah peluang tersebut, tantangan yang dihadapi Deputi II BPOM semakin kompleks. Beredarnya produk yang tidak memenuhi standar keamanan dan mutu, penyalahgunaan klaim kesehatan dalam promosi, serta meningkatnya transaksi produk melalui platform digital menuntut pengawasan yang lebih adaptif dan efektif.

Selain itu, tingkat pemahaman dan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi masih perlu ditingkatkan, begitu pula literasi masyarakat dalam memilih produk yang aman dan bermutu. Deputi II BPOM juga dihadapkan pada kebutuhan untuk mendukung inovasi industri nasional, khususnya dalam memberdayakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar mampu bersaing di pasar domestik maupun global. Di sisi lain, keterbatasan sumber daya menuntut efisiensi dalam pelaksanaan program dan optimalisasi pelayanan publik.

Dalam konteks tersebut, keberadaan Deputi II BPOM memiliki peran yang sangat strategis. Deputi II BPOM bertugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengawasan terhadap obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik guna memastikan perlindungan kesehatan masyarakat.

Melalui pengawasan yang efektif, edukasi publik, pemberdayaan pelaku usaha, serta transformasi pelayanan berbasis digital, Deputi II BPOM berupaya menciptakan ekosistem pengawasan yang adaptif, transparan, dan berdaya saing. Pelaksanaan tugas ini tidak hanya bertujuan untuk menjaga keamanan dan mutu produk yang beredar, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan industri nasional dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem pengawasan obat dan makanan di Indonesia

1.2 Gambaran Umum Organisasi

Deputi II BPOM merupakan salah satu unsur pelaksana teknis di lingkungan BPOM yang berperan penting dalam menjamin keamanan, mutu, dan manfaat produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang beredar di Indonesia.Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Deputi II BPOM bertugas untuk menyelenggarakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Dalam menjalankan tugas tersebut, Deputi II melaksanakan fungsi:

- Penyusunan kebijakan pengawasan sebelum beredar dan selama beredar, meliputi standardisasi, registrasi, pengawasan produksi, dan distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik;
- Pelaksanaan kebijakan pengawasan sebelum beredar dan selama beredar;
- Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengawasan;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi;

- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BPOM.

Sumber Daya Manusia

Deputi II BPOM memiliki peran strategis dalam pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik, yang memerlukan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan memadai. Namun, berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) tahun 2024, Deputi II BPOM masih mengalami kekurangan SDM yang cukup signifikan. Saat ini, jumlah pegawai di Deputi II BPOM sebanyak 353 orang, sedangkan kebutuhan idealnya mencapai 476 pegawai, yang berarti terdapat gap kebutuhan SDM sebesar 123 pegawai. Dengan kondisi ini, tingkat pemenuhan pegawai baru mencapai 73,11%, sehingga optimalisasi sumber daya yang ada menjadi tantangan yang harus dihadapi

Rincian jumlah pegawai di tiap unit kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 1 : Sebaran pegawai di Deputi II BPOM

NO.	UNIT KERJA	JUMLAH PEGAWAI
1	Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	54
2	Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97
3	Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	73
4	Direktorat Pengawasan Kosmetik	70
5	Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	59
	Deputi II	353

Komposisi Pegawai Deputi II BPOM Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat Pendidikan

Komposisi pegawai di lingkungan Deputi II Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan proporsi yang didominasi oleh pegawai perempuan, yaitu sebanyak 293 orang, sedangkan pegawai laki-laki berjumlah 60 orang.

Dari sisi kualifikasi pendidikan, pegawai Deputi II BPOM terdiri atas:

- Lulusan Diploma 1 : 1 orang
- Lulusan Diploma (D3/D4): 40 orang
- Lulusan Sarjana (S1): 128 orang
- Lulusan jenjang Profesi (Apoteker, Dokter, Dokter Hewan): 108 orang
- Lulusan Pascasarjana (S2): 64 orang
- Lulusan Doktoral (S3): 3 orang

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar pegawai Deputi II BPOM memiliki latar belakang pendidikan tinggi, dengan proporsi signifikan berasal dari jenjang sarjana dan profesi, yang sangat relevan untuk mendukung pelaksanaan tugas pengawasan di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Komposisi Pegawai Deputi II BPOM Berdasarkan Jabatan

Berdasarkan data kepegawaian Deputi II BPOM, total pegawai terbagi ke dalam beragam jabatan fungsional dan pelaksana dengan dominasi terbesar pada jabatan Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM), yang mencapai 260 orang. Jumlah ini menunjukkan peran strategis PFM dalam mendukung pelaksanaan fungsi teknis pengawasan di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik.

Selain PFM, jabatan lain yang mendukung fungsi manajerial dan administratif juga tersebar secara proporsional, antara lain:

- Direktur sebanyak 5 orang,
- Penata Layanan Operasional sebanyak 17 orang,
- Arsiparis sebanyak 17 orang,
- Pranata Keuangan APBN sebanyak 13 orang, dan
- Pranata Komputer sebanyak 10 orang.

Sementara itu, terdapat jabatan-jabatan pendukung lainnya yang masing-masing memiliki kurang dari 10 pegawai, seperti Pelaksana (2 orang), Perencana (4 orang), serta Pengolah Data dan Informasi (2 orang). Beberapa jabatan hanya diisi oleh satu atau dua orang, seperti Pengadministrasi Perkantoran (1 orang) dan Penata Kelola Obat dan Makanan (2 orang).

Komposisi ini menggambarkan struktur organisasi yang didominasi oleh jabatan fungsional teknis, namun tetap didukung oleh peran strategis dari jabatan administratif dan manajerial, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi Deputi II BPOM dapat berjalan secara efektif dan terintegrasi.

Tabel 2 : Komposisi pegawai berdasarkan Jabatan

NO.	JABATAN	JUMLAH PEGAWAI
1	Direktur	5
2	PFM	260
3	Penata Layanan Operasional	17
4	Arsiparis	17
5	Pelaksana	7
6	Penata Kelola Obat dan Makanan	2
7	Pranata Komputer	10
8	Pengelola Layanan Operasional	2
9	Analis SDM Aparatur	5
10	Pranata Keuangan APBN	13
11	Pranata SDM Aparatur	5
12	Perencana	4

13	Penata Laksana Barang	2
14	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	2
15	Pengadministrasi Perkantoran	1
16	Pengolah Data dan Informasi	2

1.3 Struktur Organisasi Deputi II

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, Deputi II BPOM didukung oleh lima direktorat teknis yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang saling bersinergi, yaitu:

1. Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
2. Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
3. Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;
4. Direktorat Pengawasan Kosmetik;
5. Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

Struktur organisasi Deputi II dirancang untuk memperkuat integrasi antara aspek regulasi, pengawasan, pelayanan publik, pemberdayaan, dan pengembangan daya saing industri. Setiap direktorat bekerja dalam koordinasi yang erat untuk memastikan bahwa seluruh proses pengawasan, mulai dari penyusunan regulasi, pre-market evaluation, pengawasan produksi dan distribusi, hingga pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, berjalan secara harmonis, efektif, dan selaras dengan tujuan besar BPOM dalam melindungi kesehatan masyarakat dan meningkatkan daya saing nasional.

Gambar 1 : Struktur Organisasi Deputi II BPOM

1.4 Isu Strategis

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Deputi II BPOM menghadapi sejumlah isu strategis yang mempengaruhi pelaksanaan program dan pencapaian kinerja, yaitu:

1. Pengawasan dan Pelayanan Publik Berbasis Digital
   Transformasi pengawasan dan pelayanan publik menuju sistem digital menjadi kebutuhan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan aksesibilitas layanan.

Deputi II BPOM mendorong pemanfaatan teknologi informasi dalam pengawasan produk dan pelayanan kepada pelaku usaha dan masyarakat.

2. Pemahaman dan Kepatuhan Pelaku Usaha/Stakeholder terhadap Regulasi
   Masih terdapat pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami ketentuan regulasi yang berlaku. Deputi II BPOM terus meningkatkan edukasi, bimbingan teknis, dan sosialisasi untuk membangun kepatuhan yang lebih tinggi di kalangan pelaku usaha.
3. Literasi Konsumen yang Rendah dan Peran Serta Masyarakat
   Tingkat literasi masyarakat mengenai keamanan, mutu, dan klaim produk obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik masih perlu ditingkatkan. Deputi II BPOM berupaya memperluas kegiatan edukasi publik untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan.
4. Kapasitas dan Daya Saing UMKM
   Sebagian besar UMKM di bidang obat bahan alam, dan kosmetik belum memiliki kapasitas produksi dan pemenuhan standar yang optimal. Deputi II BPOM fokus pada program pendampingan dan fasilitasi penerapan standar mutu dan keamanan bagi UMKM.
5. Pengembangan dan Pemanfaatan Obat Bahan Alam
   Potensi obat bahan alam di Indonesia sangat besar namun masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Deputi II BPOM mendorong inovasi dan pengembangan produk berbasis bahan alam yang memenuhi aspek keamanan, mutu, dan manfaat.
6. Pencantuman Promosi/Iklan yang *Overclaim*
   Masih ditemukan praktik promosi dan iklan produk yang mengandung klaim berlebihan atau tidak sesuai dengan ketentuan. Deputi II BPOM memperketat pengawasan dan pembinaan terkait ketaatan iklan untuk melindungi konsumen dari informasi yang menyesatkan.
7. Peredaran Produk OBA Mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) dan Produk Kosmetik Mengandung Bahan Berbahaya/Dilarang
   Produk obat bahan alam yang mengandung BKO dan kosmetik dengan bahan berbahaya masih beredar di pasaran. Deputi II BPOM terus melakukan intensifikasi pengawasan, sampling, dan penindakan terhadap produk-produk tersebut untuk menjaga keselamatan konsumen.
8. Pengawasan Peredaran OBA, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik di *E-commerce*
   Maraknya transaksi online menimbulkan tantangan baru dalam pengawasan produk ilegal dan tidak memenuhi syarat. Deputi II BPOM memperkuat pengawasan berbasis patroli siber dan bekerja sama dengan platform e-commerce untuk mengendalikan peredaran produk.
9. Efisiensi Anggaran
   Dalam menghadapi keterbatasan sumber daya, Deputi II BPOM berupaya mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan melalui prinsip efisiensi anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja, dengan perencanaan dan eksekusi yang lebih tepat sasaran.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

BAB II Perencanaan Kinerja

2.1 Uraian Singkat Renstra

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pengawasan dan regulasi produk obat dan makanan di Indonesia, BPOM telah merumuskan visi strategis untuk periode 2025-2029. Visi ini merupakan pondasi dalam menavigasi dan mengarahkan seluruh aktivitas dan kebijakan BPOM dalam lima tahun ke depan, dengan tujuan utama adalah melindungi kesehatan masyarakat Indonesia. Dalam Penyusunan Visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045.

Visi dan Misi

Sejalan dengan Visi Badan POM Tahun 2025-2029, maka Visi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik sebagai berikut:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 "

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman**: Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama BPOM. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu**: BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.

3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing**: BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.

4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera**: Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Dalam upaya mewujudkan visi, Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik menetapkan misi organisasi yang sejalan dengan misi BPOM sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat
2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing
3. Membangun SDM unggul terkait obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik

Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, Deputi II BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan strategis untuk periode 2025 – 2029. Tujuan-tujuan ini dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas obat dan makanan di Indonesia. Berikut adalah tujuan Deputi II BPOM untuk periode 2025 - 2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi, yang sejalan dengan Tujuan BPOM:

1. Terwujudnya Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu: Tujuan ini menegaskan komitmen Deputi II BPOM dalam memastikan bahwa semua produk obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Aman dan Bermutu: Melalui tujuan ini, Deputi II BPOM bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya memilih Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.
3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik serta Kemandirian Bangsa dengan Keberpihakan pada UMKM: Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di sektor Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Deputi II BPOM berupaya memfasilitasi lingkungan yang kondusif bagi inovasi dan pertumbuhan usaha, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.
4. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima: Melalui tujuan ini, Deputi II BPOM berkomitmen untuk

terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Rencana Kinerja Tahunan Deputi II BPOM merupakan acuan bagi Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026. Rencana Kinerja ini telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik No. HK.02.02.4.10.25.122 Tahun 2025 pada tanggal 7 Oktober 2025. Terdapat perubahan target kinerja Deputi II BPOM pada tahun 2026, yang ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM tahun 2026, sehingga perhitungan kinerja akan menggunakan target sebagaimana terdapat pada Perjanjian Kinerja. Rencana Kinerja Deputi II BPOM Tahun 2026 adalah sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

Tabel 3 : Rencana Kinerja Tahunan 2026

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	66,00
2		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	70,00
3		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	63,00
4		Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	79,25
5		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,75
6		Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87,00
7		Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86,00
8		Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82,00
9		Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	71,00
10		Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	91,00
11		Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	79,00
12		Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67,00

No	Sasaran	Indikator	Target
13		Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83,00
14		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	61,00
15	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	4,00
16	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	87,00
17	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	84,10
18		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat bahan alam dan kosmetik	62,00
19		Persentase Industri obat bahan alam dan kosmetik yang mencapai Tingkat maturitas	44,00
20	Layanan Publik BPOM yang Prima	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,75
21	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90,28
22		Nlai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82,24
23		Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5,00
24		Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,99

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM merupakan dokumen formal yang memuat komitmen antara pejabat yang diberi amanah sebagai Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik (Deputi II) dengan Kepala Badan POM selaku atasan langsung. Dokumen ini berisi pernyataan kesanggupan Deputi II dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis dan Rencana Kinerja Tahunan Badan POM, dengan mengacu pada indikator kinerja yang terukur,

relevan, dan selaras dengan tujuan pembangunan nasional di bidang kesehatan masyarakat.

Perjanjian Kinerja disusun setiap tahun sebagai bagian dari proses manajemen kinerja berbasis hasil (result-based management), yang bertujuan untuk:

- Menjadi dasar evaluasi kinerja individu pimpinan unit organisasi,
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kinerja unit kerja,
- Mendorong pencapaian sasaran strategis organisasi melalui indikator kinerja utama yang jelas dan terukur,
- Memastikan bahwa seluruh sumber daya digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang diharapkan.

Pada Tahun 2026, Deputi II BPOM menetapkan 24 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) yang menjadi acuan dalam pelaksanaan dan pengukuran capaian kinerja. Indikator tersebut mencakup aspek pengawasan produk, pelayanan publik, inovasi, koordinasi lintas sektor, serta tata kelola pemerintahan yang baik.

Tabel 4 : Perjanjian Kinerja Deputi II Tahun 2026

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSK 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	66,00
	IKSK 2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	75,00
	IKSK 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	65,00
	IKSK 4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97,75
	IKSK 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,75
	IKSK 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87,00
	IKSK 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86,60
	IKSK 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82,00

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	IKSK 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66,00
	IKSK 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93,00
	IKSK 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	74,00
	IKSK 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67,00
	IKSK 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83,00
	IKSK 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	61,00
Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK dan Kos	IKSK 15	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman	0,90
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IKSK 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	88,90
Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSK 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91,00
	IKSK 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat bahan alam dan kosmetik	64,50
	IKSK 19	Persentase Industri obat bahan alam dan kosmetik yang mencapai Tingkat maturitas	34,00
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	IKSK 20	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4,91
	IKSK 21	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90,28
	IKSK 22	Nlai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	82,24

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET
	IKSK 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	5,00
	IKSK 24	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2,99

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Deputi II BPOM menyajikan target kinerja Triwulan pada tiap indikator kinerja yang ada dalam Perjanjian Kinerja. RAPK Deputi II BPOM tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 5 : Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Deputi II BPOM Tahun 2026

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	IKSK 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	1.641.676.750
	IKSK 2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1.303.751.750
	IKSK 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	1.184.250.000
	IKSK 4	Angka Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												97,75	2.606.045.000
	IKSK 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	83,75	245.495.000
	IKSK 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	159.271.250

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSK 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	86,6	159.271.250
	IKSK 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	1.081.805.500
	IKSK 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	141.121.250
	IKSK 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	141.121.250
	IKSK 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	318.731.500
	IKSK 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	98.823.750
	IKSK 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	98.823.750

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
	IKSK 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	181.920.000
Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OT, SK dan Kos	IKSK 15	Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman										0,5	0,5	0,9	286.544.000
Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	IKSK 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu												88.9	2.181.068.000
Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi	IKSK 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	2.406.614.000
	IKSK 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi obat bahan alam dan kosmetik	0	0	4	12	20	30	38	45	50	55	60	64,5	994.776.000

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET												ANGGARAN
			B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	
dan Pangan Olahan	IKSK 19	Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas												34	1.338.580.000
Layanan Publik BPOM yang Prima	IKSK 20	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan												4.91	5.259.381.000
Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSK 21	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik												90,28	1.410.491.500
	IKSK 22	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												82,24	317.328.500
	IKSK 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												5,00	1.939.377.000
	IKSK 24	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK dan Kos												2.99	268.279.000

2.5. Metode Pengukuran

Metode pengukuran indikator kinerja disusun untuk memastikan bahwa setiap pencapaian dapat diukur secara objektif, terstandar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen metode pengukuran ini memuat definisi operasional indikator, satuan ukur, cara penghitungan, unit penanggung jawab data, serta kriteria keberhasilan capaian.

1. **Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu**

   Obat Bahan Alam adalah bahan, ramuan bahan, atau produk yang berasal dari sumber daya alam berupa tumbuhan, hewan, jasad renik, mineral, atau bahan lain dari sumber daya alam, atau campuran dari bahan tersebut yang telah digunakan secara turun temurun, atau sudah dibuktikan berkhasiat, aman, dan bermutu, digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan/atau pemulihan kesehatan berdasarkan pembuktian secara empiris dan/ atau ilmiah.

   Kriteria Obat Bahan Alam aman dan bermutu, meliputi: 1) Memiliki NIE yang berlaku, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

   Alur pemeriksaan hasil sampling obat bahan alam dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 . dengan ketentuan:

   1) Yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.
   2) Jika poin 1,2 dan 3 tidak terpenuhi maka tidak dilakukan pengujian.
   3) Jika poin 4 tidak dipenuhi maka tetap dilakukan pengujian.
   4) Untuk sampel dengan Klaim risiko tinggi yang tidak memenuhi point 1 maka tetap dilakukan pengujian.

   Sampel obat bahan alam tidak aman dan bermutu dihitung berdasarkan satuan bets**.** Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan.

2. **Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu**

   Suplemen Kesehatan adalah produk yang dimaksudkan untuk melengkapi kebutuhan zat gizi, memelihara, meningkatkan dan/atau memperbaiki fungsi kesehatan, mempunyai nilai gizi dan/atau efek fisiologis, mengandung satu atau lebih bahan berupa vitamin, mineral, asam amino dan/atau bahan lain bukan tumbuhan yang dapat dikombinasi dengan tumbuhan.

   Kriteria Suplemen Kesehatan aman dan bermutu, meliputi: 1) Memiliki NIE yang berlaku, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian

   Alur pemeriksaan hasil sampling obat bahan alam dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 . yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Sampel suplemen kesehatan tidak aman dan bermutu dihitung berdasarkan satuan bets.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan.

3. Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu

Kosmetik adalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan pada bagian luar tubuh manusia seperti epidermis, rambut, kuku, bibir, dan organ genital bagian luar, atau gigi dan membran mukosa mulut terutama untuk membersihkan, mewangikan, mengubah penampilan, dan/atau memperbaiki bau badan atau melindungi atau memelihara tubuh pada kondisi baik.

Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman Sampling kosmetik dengan menggunakan sampling targeted/purposive di tahun berjalan. Sampel kosmetik meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling. Sampel kosmetik mencakup sampel UPT.

Kriteria kosmetik aman dan bermutu, meliputi: 1) Memiliki NIE/bukan produk ilegal termasuk palsu, 2) Tidak kedaluwarsa, 3) Tidak rusak, 4) Memenuhi ketentuan penandaan, dan 5) Memenuhi syarat berdasarkan pengujian.

Alur pemeriksaan hasil sampling kosmetik dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin c.1 hingga poin c.5 . yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin c.1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin c.2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5. Jumlah produk kosmetik TMS dihitung berdasarkan satuan bets.

Jika tidak termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji. Jika ditemukan sampel kosmetik yang TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Kometik yang Aman dan Bermutu adalah Direktorat Pengawasan Kosmetik.

4. Indeks Kualitas Kebijakan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) adalah instrumen untuk mengukur kualitas kebijakan pemerintah terutama terhadap dampak atau hasil bagi pembangunan yang strategis dengan mengedepankan prinsip berbasis bukti (*evidence-based*).
IKK bertujuan untuk .

Indeks Kualitas Kebijakan merupakan instrumen yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kualitas kebijakan pemerintah melalui metode pengukuran mandiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh Lembaga Admistrasi Negara (LAN)
Ruang lingkup kebijakan yang disepakati sebagai Objek yang akan dinilai yaitu kebijakan dalam bentuk Peraturan Badan POM yang memenuhi ketentuan:

a. Memiliki jangka waktu pemberlakukan selama 3 (tiga) tahun terakhir;
b. Bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang hanya memiliki materi muatan pencabutan peraturan perundang-undangan lainnya,
c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan teknis tugas dan fungsi Badan POM,
d. Kualitas kebijakan diukur dengan dimensi penilaian yang terdiri 4 Dimensi dan 1 profil, yaitu: Pelibatan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan dalam Pengukuran kualitas Kebijakan, Perencanaan Kebijakan, Implementasi kebijakan, evaluasi dan keberlanjutan kebijakan, tranparasin dan partisipasi publik.
e. Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan ditetapkan hasilnya oleh Lembaga Administrasi Negara

Cara Perhitungan dan Formula: Berdasarkan instrumen yang dikembangkan oleh LAN.
Kriteria yang digunakan adalah:

a. 91,00 – 100 : Unggul
b. 80,00 – 90,99 : Sangat Baik
c. 65,00 – 79,99 : Baik
d. 50,00 – 64,99 : Cukup
e. < 50,00 : Kurang

5. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT ataupun Unit Kerja Pusat kepada lintas sektor yang memiliki kewenangan dan tanggungjawab terhadap sarana produksi/distribusi obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen.

Tindak lanjut adalah *feedback*/respon dari lintas sektor terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT ataupun Unit Kerja Pusat. Lintas sektor meliputi pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan**.**

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan dan Direktorat Pengawasan Kosmetik.

6. **Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan**

   Sarana produksi Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik adalah adalah jumlah sarana produksi Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Industri Suplemen Kesehatan, dan Industri Kosmetik.

   Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada peraturan dan/atau pedoman yang berlaku terkait pengawasan Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

   Cara Perhitungan:

   (Jumlah sarana produksi Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan / Jumlah sarana produksi Obat Bahan alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diperiksa) x 100%

   Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran indikator kinerja ini yaitu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Pengawasan Kosmetik.

7. **Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan**

   Sarana distribusi adalah sarana distribusi yang melakukan pendistribusian terhadap produk obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik.
   Dasar penetapan sarana distribusi MK/TMK mengacu pada peraturan dan/atau pedoman yang berlaku terkait pengawasan Obat Bahan alam

   Cara perhitungan

   Jumlah sarana distribusi yang memenuhi ketentuan / Jumlah sarana distribusi yang diperiksa

   Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran indikator kinerja ini yaitu Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan, Direktorat Pengawasan Kosmetik

8. **Persentase Iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan**

   Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

   Pengawasan iklan dilakukan baik rutin dan insidental terhadap iklan yang dipublikasikan sesuai dengan target dan tanggungjawab UPT berdasarkan Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

   Kesesuaian pelaksanaan pengawasan iklan oleh UPT mengacu pada Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

serta peraturan mengenai periklanan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik maupun ketentuan terkait.

Cara perhitungan: Jumlah iklan yang diawasi sesuai ketentuan/jumlah target pengawasan iklan *100%.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang memenuhi ketentuan adalah Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan dan Direktorat Pengawasan Kosmetik.

9. Persentase Kabupaten/kota sadar Jamu Aman

Program Sadar Jamu Aman merupakan upaya peningkatan pelestarian jamu melalui pengembangan dan pemanfaatan jamu serta kesadaran konsumsi jamu yang aman untuk kesehatan oleh masyarakat. Program Sadar Jamu Aman akan dilaksanakan dengan melibatkan Kabupaten/Kota serta *influencer*.

Perhitungan indikator= Jumlah Kabupaten/Kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman .

Cara Perhitungan Jumlah Kabupaten/Kota yang berkomitmen melaksanakan Program Sadar Jamu Aman :

Setiap tahun target nya 10 kabupaten/kota yang berkomitmen melaksanakan program sadar jamu Aman dan tiap tahun kumulatif dari Triwulan Sebelumnya sehingga di akhir RPJMN tahun 2029 jumlah nya 50 kabupaten/kota yang melaksanakan program sadar jamu aman.

Target tahunan (%) dihitung dari capaian kabupaten/kota pertahun dibagi jumlah komulatif kabupaten/kota di akhir RPJMN tahun 2029 (50).

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase kabupaten/kota sadar Jamu Aman adalah Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

10. Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu

Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu. Masyarakat adalah konsumen obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM.

Kesadaran diukur melalui 3 aspek, yaitu:

a. Pengetahuan (*Knowledege*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi sediaan farmasi dan Makanan dengan benar. Dari

sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.

b. Sikap (*Attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan makanan yang aman dan bermutu.
c. Perilaku (*Practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi sediaan farmasi dan Makanan dengan baik.

Indeks kesadaran masyarakat dilakukan melalui survei dengan metode *Computer Assisted Personal Interviewing* (CAPI) berbasis *offline* dan *online*. Desain sampling menggunakan *stratified random sampling* dimana pengembangan desain dan metodologi survei kesadaran masyarakat dilakukan bekerja sama dengan Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei - Badan Pusat Statistik.

Perhitungan indeks diukur dari rata-rata tertimbang (*weighted mean score*) indikator kesadaran dengan mempertimbangkan bobot, yaitu bobot penduduk (BPS), bobot pertanyaan per aspek pengetahuan, sikap dan perilaku serta bobot komoditi. Pengukuran kesadaran masyarakat juga dilakukan terhadap 5 (lima) produk yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Kelima produk tersebut memiliki nilai indeks kesadaran masing-masing dan diagregatkan menjadi Indeks kesadaran. Indeks Kesadaran Nasional diperoleh dari penjumlahan atas hasil perkalian indeks kesadaran setiap komoditi dengan bobot masing-masing komoditi.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu, yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

11. Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar

Kemandirian bahan baku Obatb Bahan Alam (OBA) yaitu:

1) Bahan Baku OBA yang bermutu adalah bahan baku yang dihasilkan dari Industri Ekstrak Bahan Alam telah terstandar, baik proses produksi yang distandarisasi maupun bahan baku yang terstandar.
2) Industri Ekstrak Bahan Alam adalah Industri yang memproduksi bahan baku alam bentuk ekstrak, dimana bahan baku alam tersebut merupakan bahan baku/raw material bagi industri obat bahan alam, UMK, Industri Kosmetik dan Industri pangan. Proses produksi bahan baku alam dengan menerapkan CPOTB Tahun 2021.
3) Bahan Baku Obat Bahan Alam adalah bahan baku yang berasal dari tanaman dan hewan berupa ekstrak yang di diproduksi oleh Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA).

Definisi tahapan pendampingan inovasi obat bahan alam:

1) Penyusunan protokol uji praklinik/klinik (80%);
2) Pelaksanaan penelitian (15%) mencakup persiapan (5%) dan pelaksanaan (10%);
3) Standardisasi produk dan/atau submit dokumen NIE (5%); dan
4) Jika hasil sudah selesai atau jika dalam 3 bulan pendaftar tidak merespon surat Tambahan Data dianggap selesai (100%).

Cara Perhitungan: menghitung Rata-rata dari Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam, Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik obat bahan alam, suplemen kesehatan dan Kosmetik, serta penilaian DIP yang efektif, Persentase peningkatan penelitian uji pra klinik dan uji klinik Jamu yang didampingi sesuai standar, Persentase Industri Ekstrak bahan alam (IEBA) yang menghasilkan bahan Baku OBA yang bermutu.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar, yaitu Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik, dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

12. Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik

Ruang lingkup UMK mencakup Usaha Mikro dan Kecil:

a. Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah); dan
b. Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).

UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik adalah UMKM yang memperoleh Sertifikat CPOTB Bertahap/ Sertifikat CPKB / SPA CPKB dan/ atau Nomor Izin Edar (NIE).

Cara Perhitungan : Jumlah UMKM yang memperoleh Sertifikat CPOTB Bertahap/ Sertifikat CPKB / SPA CPKB dan/ atau Nomor Izin Edar (NIE) dibagi jumlah UMKM OBA dan Kos yang didampingi dikali 100%.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik, yaitu Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik.

13. Persentase Industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat maturitas

Industri kosmetik adalah industri yang memproduksi kosmetika yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundangundangan yang memiliki bukti penerapan CPKB.
Program maturitas adalah program pembinaan/penilaian yang bertujuan mengarahkan industri kosmetik sehingga dapat menerapkan aspek CPKB secara penuh
Industri Obat Bahan Alam adalah Industri yang memproduksi OT, Suplemen keseahtan, Obat Kuasi yang telah memiliki izin usaha industri atau tanda daftar industri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Industri Obat Bahan Alam

ini wajib menerapkan CPOTB secara penuh/full aspek sesuai pedoman CPOTB terkini yaitu PerBPOM 25 Tahun 2021 tentang Penerapan CPOTB.
Maturitas Industri Obat Bahan Alam perlu dinilai dan ditetapkan dengan tools penilaian maturitas yang mencakup Aspek Pemenuhan CPOTB (indeks cluster berdasarkan data mapping dan track record hasil pemeriksaan rutin CPOTB) dan Aspek Kepatuhan terhadap Regulasi di Bidang Obat Bahan Alam (Track Record Keamanan, Mutu, Penandaan dan Penerapan Pharmacovigilance). Program maturitas ini bertujuan untuk mengelompokkan Industri Obat Bahan Alam ke dalam level maturitas tertentu sehingga pengawasan yang dilakukan dapat lebih efektif dan tepat sasaran.
Industri dengan tingkat maturitas yang tinggi adalah industri telah menerapkan CPOTB secara paripurna dan patuh terhadap regulasi di bidang OTSK, kepada Industri yang seperti ini dapat dilakukan less inspection karena dinilai telah mampu menerapkan jaminan mutu dalam melakukan produksi obat bahan alam. Industri yang seperti ini dapat digunakan sebagai mitra Badan POM sebagai orang tua angkat UMKM, mitra dalam peningkatan kompetensi petugas Badan POM misal sebagai tempat PKL, mitra dalam pembuatan konten edukasi Badan POM, dan lain-lain.
Sebagai dampak adanya *less inspection* pada Industri dengan tingkat maturitas tinggi, maka *focused inspection* dapat dilakukan pada Industri dengan tingkat maturitas menengah dan rendah untuk mengarahkan pada peningkatan level maturitas Cara perhitungan Jumlah industri yang berhasil menerapkan CPKB secara penuh setelah menerapkan program dibandingkan sebelum menerapkan program (masih menerapkan CPKB secara bertahap).

Cara perhitungan

- Jumlah industri yang berhasil menerapkan CPKB secara penuh setelah menerapkan program dibandingkan sebelum menerapkan program (masih menerapkan CPKB secara bertahap) (50%)
- Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya /Jumlah Seluruh Industri Obat Bahan Alam di Indonesia (50%)

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran kinerja ini yaitu: Direktorat Pengawasan Kosmetik dan Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan.

14. Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan

Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);
2) Profesionalitas SDM (18%);
3) Sarana Prasarana (15%);
4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);
5) Konsultasi dan Pengaduan (15%);
6) Inovasi (7%).

Penilaian kinerja UPP mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Cara Perhitungan:

Dilakukan penilaian oleh Tim Penilai UPP BPOM (Biro Hukum dan Organisasi dan Inspektorat Utama)

Kategori nilai:

a) 0 - 1,00 F Gagal
b) 1,01 - 1,50 E Sangat Buruk
c) 1,51 - 2,00 D Buruk
d) 2,01 - 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan)
e) 2,51 - 3,00 C Cukup
f) 3,01 - 3,50 B- Baik (Dengan Catatan)
g) 3,51 - 4,00 B Baik
h) 4,01 - 4,50 A- Sangat Baik
i) 4,51 - 5,00 A Pelayanan Prima

15. Nilai Pembangunan ZI Deputi II BPOM

Nilai pembangunan zona integritas merupakan hasil dari implementasi pelaksanaan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkup Unit Organisasi.

Cara Perhitungan:

Nilai dari hasil evaluasi zona integritas Unit Organisasi yang dinilai oleh tim evaluator Zona Integritas BPOM.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Nilai Pembangunan ZI Deputi II BPOM adalah Inspektorat Utama.

16. NIai AKIP Deputi II BPOM

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta PermenPANRB No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, SAKIP merupakan sistem penerapan manajemen kinerja Deputi II BPOM yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah terdapat penyesuaian komponen dan bobot penilaian dalam evaluasi SAKIP, serta adanya Surat Edaran Inspektur Utama Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor Pi.04.7.72.01.23.01 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pengisian Lembar Kerja Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan dengan komponen dan bobot sebagai berikut:

Komponen:

a) Perencanaan Kinerja (bobot 24)
b) Pengukuran Kinerja (bobot 24)
c) Pelaporan Kinerja (bobot 12)

d) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (20)
e) Capaian Kinerja (20)
f) Sumber Data:
g) Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Utama dari Tim Evaluator AKIP BPOM

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Nilai AKIP Deputi II BPOM adalah Inspektorat Utama.

17. Nilai Kinerja Anggaran Deputi II BPOM

Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Deputi II BPOM yang diperoleh dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran

1) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran
   Indikator pembentuk Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran sebagai berikut:
   a) Efektivitas (75%), yang berisi nilai Capaian RO
   b) Efisiensi (25%), terdiri dari Penggunaan SBK dan Efisiensi SBK
2) Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang terdiri dari:
   a) Revisi DIPA (10%);
   b) Deviasi Hal III DIPA (15%);
   c) Penyerapan Anggaran (20%);
   d) Belanja kontraktual (10%);
   e) Penyelesaian Tagihan (10%);
   f) Pengelolaan UP dan TUP (10%);
   g) Capaian Output (25%);

Cara Perhitungan Nilai Kinerja Anggaran Deputi II BPOM, yaitu:

Nilai Kinerja Anggaran = (NK Perencanaan Anggaran x 50%) + (Nilai IKPA x 50%)

Keterangan:

Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 6 : Kategori Konversi Nilai Kinerja Anggaran

Nilai	Kategori	Konversi NIlai
0 s.d. 50	Sangat Kurang	1
50,01 s.d. 60	Kurang	2
60,01 s.d. 80	Cukup	3
80,01 s.d. 90	Baik	4
90,01 s.d. 100	Sangat Baik	5

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Nilai Kinerja Anggaran Deputi II BPOM adalah Kementerian Keuangan.

18. Indeks Manajemen Risiko Deputi II BPOM

Manajemen Risiko merupakan pendekatan sistematis yang meliputi budaya, proses, dan struktur untuk menentukan tindakan terbaik terkait risiko yang dihadapi dalam pencapaian tujuan /sasaran organisasi. Tingkat Maturitas adalah suatu kondisi penerapan manajemen risiko yang terbagi dalam 5 (lima) kategori. tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menunjukkan tingkat kematangan implementasi manajemen risiko dalam suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturitas manajemen risiko bertujuan untuk:

1. Mengetahui kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko sebagai salah stau alat manejeemn dalam memberikan keyakinan kepada stakeholder bahwa tujuan dan sasaran tercapai sebagaimana diharapkan,
2. Memberikan umpan balik untuk peningkatan pencapaian tujuan dan manfaat penerapan manajemen risiko, dan
3. Menjaga pemenuhan prinsip penerapan manajemen risiko.

Cara Perhitungan:

Nilai maturitas manajemen risiko diperoleh dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Deputi II BPOM yang menggunakan kertas kerja evaluasi maturitas manejemen risiko yang nilainya terbagi dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 7 : Kategori Tingkat Maturitas

Menuju Tingkat Maturitas	Skor Total	Nilai Maturitas	Tingkat Maturitas
Risk Naive	0-16	1	-
Risk Aware	17-32	2	Peningkatan *Risk Naive* menuju *Risk Aware*
Risk Defined	33-48	3	Peningkatan *Risk Aware* menuju *Risk Defined*
Risk Managed	49-64	4	Peningkatan *Risk Defined* menuju *Risk Managed*
Risk Enabled	65-80	5	Peningkatan *Risk Managed* menuju *Risk Enabled*

Cara perhitungan level maturitas:

Skor Maturitas = (Skor Total)/16

Keterangan:

- Skor maturitas merupakan nilai yang menjadi indeks maturitas manajemen risiko.
- Skor Total merupakan nilai akhir dari pengisian kertas kerja evaluasi berdasarkan evaluasi oleh Inspektorat Utama.

Penanggung jawab pengumpulan data yang mendukung pengukuran Indeks Manejemen Risiko Deputi II BPOM adalah Inpektorat Utama.

Pengukuran indikator kinerja dilakukan dengan cara menghitung realisasi setiap indikator dari setiap sasaran strategis sesuai definisi operasional indikator, yang ditetapkan pada saat perencanaan kinerja. Selanjutnya dihitung persentase capaian kinerja untuk masing-masing indikator, dengan cara membandingkan antara realisasi dan target yang telah ditetapkan pada perjanjian kinerja. Penyajian dapat berupa tabel atau grafik.

Untuk indikator positif/polarisasi maximize (semakin tinggi realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Untuk indikator negatif/polarisasi minimize (semakin kecil realisasinya, semakin baik kinerjanya) dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\% \text{ Capaian} = 1 + \frac{(1 - \text{Realisasi})}{\text{Target}} \times 100\%$$

Capaian indikator kinerja dinyatakan dalam kategori sebagai berikut:

Tabel 8 : Kriteria Capaian Indikator Kinerja

Kategori	Capaian	Notifikasi Warna
Tidak dapat disimpulkan	> 110%	
Sangat Baik	100% ≤ x ≤ 110%	
Baik	90% < x < 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	< 60%	

Dengan mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja, maka perlu melakukan normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:

(1) Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%; dan
(2) Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

NKO periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah

dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut.

Hasil NKO dikelompokan menjadi 5 (lima) predikat, yaitu 1) Sangat Kurang; 2) Kurang; 3) Butuh Perbaikan; 4) Baik; dan 5) Istimewa, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9 : Kriteria Predikat Nilai Kerja Organisasi

Predikat NKO	Nikai Kerja Organisasi (NKO)	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$\mathbf{IE} ¿ \frac{\%\,CapaianOutput}{\%\,Capaianinput} \mathbf{IE} ¿ \frac{100\,\%}{100\,\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

Tabel 10 : Tingkat Efisiensi

No.	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,20	100% (efisien)
3	0,21 – 0,40	95% (efisien)
4	0,41 – 0,60	92% (efisien)
5	0,61 – 0,80	90% (efisien)
6	0,81 – 1,00	88% (efisien)
7	1,01 – 1,20	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,40	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,60	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,80	78% (tidak efisien)
11	> 1,81	75% (tidak efisien)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

BAB III Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja Deputi II BPOM pada Tahun 2026 diukur menggunakan 24 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai representasi pencapaian sasaran strategis organisasi. Pada Triwulan ini, sebanyak 15 IKSK telah dapat diukur capaiannya, sementara 9 IKSK lainnya belum dapat diukur capaiannya.

Berdasarkan hasil pengukuran terhadap indikator yang telah terealisasi, Deputi II BPOM memperoleh total capaian kinerja sebesar 1.346,55 dengan Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 89,77 dan termasuk dalam kategori Baik. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pada awal tahun telah berjalan dengan efektif, dengan sebagian besar indikator menunjukkan kinerja yang mendekati atau bahkan melampaui target yang telah ditetapkan. Indikator yang melampaui target terutama berasal dari aspek pengawasan produk dan distribusi, serta pemberdayaan pelaku usaha, yang mencerminkan kuatnya implementasi pengawasan berbasis risiko dan pembinaan yang terarah.

Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang capaian kinerjanya belum optimal, terutama pada aspek pengawasan sarana produksi dan pengawasan iklan, yang dipengaruhi oleh dinamika pelaksanaan kegiatan serta tingkat kepatuhan pelaku usaha yang bervariasi. Selain itu, terdapat indikator yang belum dapat diukur pada Triwulan I, yang memerlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya agar capaian kinerja dapat tergambarkan secara lebih komprehensif.

Rincian capaian kinerja dari tiap Indikator kinerja pada 2026 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 11 : Nilai Kinerja Organisasi Tahun 2026

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai Akhir Capaian PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	66,00	68,33	103,53	103,53
2		Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	75,00	89,4	119,20	119,20
3		Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	65,00	62,59	96,29	96,29
4		Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,75	69,23	82,66	82,66
5		Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87,00	75,93	87,28	87,28
6		Persentase sarana produksi suplemen kesehatan yang memenuhi ketentuan	86,6	0	0	0
7		Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82,00	77,55	94,57	94,57
8		Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66,00	72,11	109,26	109,26
9		Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93,00	94,12	101,20	101,20
10		Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	74,00	70,15	94,80	94,80
11		Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67,00	54,72	81,67	81,67
12		Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83,00	66,84	80,53	80,53
13		Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	61,00	61,25	100,41	100,41

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Nilai Akhir Capaian PK
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
14	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91,00	91,09	100,10	100,10
15		Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	4,00	4,17	104,52	96,66
	Total Capaian PK					1346,55
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-rata Capaian PK)					89,77
	Predikat NKO					Baik

Tabel 12 : Capaian Kinerja Triwulan I tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Target (% / Nilai)	Realisasi (% / Nilai)	Capaian (%)	Kategori / Notifikai Warna
SK 1	**Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**			103,76	Sangat baik
IKSK 1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	66,00	68,33	103,53	Sangat baik
IKSK 2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	75,00	89,40	119,20	Tidak dapat disimpulkan
IKSK 3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	65,00	62,59	96,29	Baik
IKSK 4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	n/a
IKSK 5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,75	69,23	82,66	Cukup
IKSK 6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87,00	75,93	87,28	Cukup
IKSK 7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86,60	0,00	0,00	Kurang
IKSK 8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82,00	77,55	94,57	Baik
IKSK 9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66,00	72,11	109,26	Sangat baik
IKSK 10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93,00	94,12	101,20	Sangat baik
IKSK 11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	74,00	70,15	94,80	Baik
IKSK 12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67,00	54,72	81,67	Cukup
IKSK 13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83,00	66,84	80,53	Cukup
IKSK 14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	61,00	61,25	100,41	Sangat baik
SK 2	**Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik**			n/a	n/a
IKSK 15	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	n/a	n/a	n/a	n/a

No.	Sasaran Kegiatan / Indikator Kinerja	Target (% / Nilai)	Realisasi (% / Nilai)	Capaian (%)	Kategori / Notifikai Warna
SK 3	**Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu**			n/a	n/a
IKSK 16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	n/a	n/a	n/a	n/a
SK 4	**Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan**			102,17	Sangat baik
IKSK 17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91,00	91,09	100,10	Sangat baik
IKSK 18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat bahan alam dan kosmetik	4,00	4,17	104,25	Sangat baik
IKSK 19	Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	n/a	n/a	n/a	n/a
SK 5	**Terwujudnya Tata Kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal**			n/a	n/a
IKSK 20	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	n/a	n/a	n/a	n/a
IKSK 21	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	n/a
IKSK 22	Nilai AKIP Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	n/a
IKSK 23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	n/a
IKSK 24	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	n/a

Kinerja Deputi II BPOM Tahun 2026 diukur melalui 24 IKSK yang menggambarkan capaian pada aspek pengawasan, pembinaan, pelayanan publik, tata kelola, serta penguatan sistem manajemen internal. Pada Triwulan I ini hanya ada 15 indikator yang sudah dapat dilakukan pengukurannya, sementara 9 indikator lainnya baru dapat diukur pada Triwulan IV. Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat positif, dengan rincian predikat indikator sebagai berikut:

- 6 indikator memperoleh predikat Sangat Baik,
- 3 indikator memperoleh predikat Baik,

- 4 indikator memperoleh predikat Cukup,
- 1 indikator memperoleh predikat Tidak Dapat Disimpulkan,
- 1 indikator memperoleh predikat kurang

Indikator dengan predikat Sangat Baik mendominasi capaian kinerja Deputi II BPOM, hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar target program strategis berhasil dicapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada aspek kualitas kebijakan, keamanan dan mutu produk, pelayanan publik, serta tata kelola organisasi. Indikator dengan predikat Baik dan Cukup menjadi area yang memerlukan penguatan lebih lanjut melalui peningkatan efektivitas pengawasan berbasis risiko, optimalisasi pembinaan pelaku usaha, serta penguatan monitoring dan evaluasi internal.

Adapun dua indikator yang tidak terealisasi tidak disebabkan oleh kelemahan implementasi, melainkan oleh faktor eksternal berupa pemblokiran anggaran, sehingga kegiatan operasional yang mendukung pencapaian indikator tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Secara keseluruhan, kinerja Deputi II BPOM Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan tingkat efektivitas dan akuntabilitas yang tinggi, dengan mayoritas indikator berada pada kategori Sangat Baik. Meskipun terdapat keterbatasan pada beberapa indikator, capaian tahun ini tetap menggambarkan komitmen kuat dalam menjaga keamanan, mutu, dan kepatuhan di bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik, serta penguatan tata kelola organisasi yang berkelanjutan. Berikut adalah analisis capaian kinerja dari tiap indikator:

1. Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu

Salah satu indikator utama dalam pengukuran efektivitas pengawasan Deputi II BPOM adalah Persentase Obat Bahan Alam (OBA) yang Aman dan Bermutu. Indikator ini memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan produk OBA terhadap ketentuan regulasi serta efektivitas sistem pengawasan post-market yang diterapkan. Pengukuran indikator dilakukan berdasarkan hasil sampling terhadap produk OBA yang beredar di pasaran, kemudian dievaluasi berdasarkan lima kriteria mutu dan keamanan yang telah ditetapkan.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan dan tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I

Tabel 13 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap target Triwulan I Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	66,00	68,33	103,53	Sangat baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 66,00%, realisasi mencapai 68,33%, dengan tingkat capaian sebesar 103,53% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas pengawasan terhadap Obat Bahan Alam telah berjalan secara efektif, sehingga proporsi produk yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu dapat dijaga bahkan melampaui target yang ditetapkan. Keberhasilan ini juga menunjukkan peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar produksi dan distribusi, serta efektivitas strategi pengawasan berbasis risiko yang diterapkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi Triwulan iini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 14 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang Aman dan Bermutu terhadap Target Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	66,00	68,33	103,53	Tercapai / Melampaui

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target tahunan sebesar 66,00%, realisasi yang berhasil dicapai adalah sebesar 68,33%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 103,53%. Dari hasil ini maka diyakini bahwa target tahunan akan tercapai bahkan melampaui.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pengawasan dan pembinaan terhadap produk obat bahan alam telah berjalan secara efektif dan mampu melampaui ekspektasi yang ditetapkan. Realisasi yang melebihi target pada awal tahun juga menunjukkan konsistensi dalam penerapan standar keamanan dan mutu, serta optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan baik pada tahap pre-market maupun post-market.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan upaya upaya yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase Obat Bahan Alam yang aman dan bermutu pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 103,53%, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Dari total 1.181 sampel yang diperiksa, sebanyak 807 sampel memenuhi ketentuan, yang menunjukkan tingkat kepatuhan mutu produk Obat Bahan Alam yang cukup tinggi di peredaran.

Keberhasilan ini didukung oleh penerapan pengawasan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang tepat, sehingga kegiatan pengawasan dapat difokuskan pada produk dengan potensi risiko lebih tinggi. Selain itu, pelaksanaan pengambilan sampel yang mengacu pada pedoman sampling memastikan bahwa sampel yang diuji bersifat representatif, sehingga hasil pengujian mampu menggambarkan kondisi mutu produk secara akurat. Sinergi antara ketepatan analisis risiko dan metode sampling yang sesuai memberikan kontribusi signifikan dalam menjamin keamanan dan mutu Obat Bahan Alam di peredaran.

Capaian tersebut juga didukung oleh berbagai upaya strategis yang telah dilakukan, antara lain melalui pelaksanaan desk penetapan target UPT untuk memastikan alokasi pengawasan sampling lebih terarah dan berbasis risiko, pelaksanaan bimbingan teknis sampling dan pengujian guna meningkatkan kompetensi petugas, serta monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap UPT untuk menjamin kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan pedoman yang berlaku.

2. Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu

Indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas pengawasan produk post-market oleh Deputi II BPOM, khususnya dalam menjamin kualitas dan keamanan suplemen kesehatan yang beredar di masyarakat.

Indikator ini diukur berdasarkan hasil sampling produk suplemen kesehatan dari sarana distribusi dan penjualan, yang kemudian dinilai berdasarkan lima kriteria kelayakan mutu dan keamanan.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan dan tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I

Tabel 15 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Triwulan I 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	75,00	89,40	119,20	Tidak Dapat disimpulkan

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang jauh melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 75%, realisasi mencapai 89,40%, dengan tingkat capaian sebesar 119,20%.

Meskipun secara substansi capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, namun berdasarkan ketentuan penilaian kinerja, capaian yang melebihi batas tertentu tidak dapat

langsung dikategorikan secara konklusif, sehingga indikator ini memperoleh kriteria "Tidak Dapat Disimpulkan."

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi Triwulan iini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 16 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu terhadap target Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu	75,00	89,40	119,20	Tercapai / Melampaui

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang Aman dan Bermutu menunjukkan kinerja yang sangat optimal. Dari target tahunan sebesar 75%, realisasi yang berhasil dicapai telah mencapai 89,4%, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebesar 119,20%. Berdasarkan hasil tersebut, maka diyakini bahwa target tahun 2026 akan tercapai bahkan melampaui.

Capaian yang jauh melampaui target pada awal tahun ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap suplemen kesehatan telah berjalan sangat efektif, baik melalui penguatan pengawasan pre-market maupun post-market, serta peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap standar keamanan dan mutu. Selain itu, capaian ini juga menunjukkan keberhasilan strategi pembinaan dan pengawasan berbasis risiko yang telah diterapkan.

Analisis Penyebab Keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat optimal dengan capaian sebesar 119,20%, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Dari total 283 sampel yang diperiksa, sebanyak 253 sampel memenuhi ketentuan atau sebesar 89,40%, yang menunjukkan tingkat kepatuhan mutu produk suplemen kesehatan yang cukup tinggi di peredaran.

Keberhasilan ini didukung oleh penerapan pengawasan berbasis risiko (*risk-based approach*) yang memungkinkan fokus pengawasan diarahkan pada produk dengan

potensi risiko lebih tinggi, sehingga meningkatkan efektivitas pengawasan. Selain itu, pelaksanaan sampling yang mengacu pada pedoman yang berlaku telah menghasilkan sampel yang cukup representatif, sehingga mampu memberikan gambaran kondisi mutu produk secara relatif akurat. Namun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam implementasi pedoman sampling agar pengambilan sampel semakin tepat sasaran dan mampu mengidentifikasi produk yang tidak memenuhi syarat secara lebih optimal.

Capaian tersebut juga didukung oleh berbagai upaya strategis yang telah dilakukan, antara lain melalui pelaksanaan desk penetapan target UPT untuk memastikan alokasi pengawasan sampling lebih terarah, bimbingan teknis sampling dan pengujian guna meningkatkan kompetensi petugas, serta monitoring dan evaluasi (monev) secara berkala terhadap UPT untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.

3. Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu

Indikator ini bertujuan untuk menilai sejauh mana produk kosmetik yang beredar di pasar memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku terkait keamanan dan mutu produk, serta sejauh mana pelaksanaan pengawasan telah berhasil mengurangi peredaran produk yang tidak memenuhi syarat. Pengukuran dilakukan berdasarkan hasil sampling targeted/purposive, sesuai dengan Pedoman Sampling Kosmetik yang berlaku pada tahun berjalan.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan dan tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I

Tabel 17 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap target Triwulan I tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	65,00	62,59	96,29	Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang mendekati target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 65,00%, realisasi mencapai 62,59%, dengan tingkat capaian sebesar 96,29% dan termasuk dalam kategori Baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar produk kosmetik yang beredar telah memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, meskipun masih terdapat gap yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target secara penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan telah berjalan efektif, namun masih menghadapi tantangan,

terutama pada produk berisiko tinggi dan pelaku usaha dengan tingkat kepatuhan yang belum optimal.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi Triwulan iini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 18 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Kosmetik yang Aman dan Bermutu terhadap target Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	65,00	62,59	96,29	Akan Tercapai

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari target tahunan sebesar 65,00%, realisasi yang dicapai hingga Triwulan I adalah sebesar 62,59%, dengan capaian kinerja sebesar 96,29%.

Meskipun realisasi belum melampaui target, capaian yang telah mendekati target menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap kosmetik telah berjalan secara efektif. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi dalam pengawasan mutu dan keamanan kosmetik, baik melalui kegiatan pre-market maupun post-market, serta adanya peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi yang berlaku.

Berdasarkan capaian hingga Triwulan I, dapat disimpulkan bahwa indikator ini berpotensi untuk mencapai target pada akhir tahun 2026, dengan catatan diperlukan upaya yang berkelanjutan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja. Penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan intensitas pemeriksaan, serta sinergi dengan pemangku kepentingan menjadi langkah penting untuk memastikan target dapat tercapai secara optimal.

Analisis Penyebab kegagalan dan upaya upaya yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 96,29% menunjukkan kinerja yang cukup baik dan mendekati target, namun belum optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dari total 2.045 sampel yang diperiksa, sebanyak 1.280 sampel memenuhi ketentuan atau sebesar

62,59%, yang mengindikasikan masih terdapat produk kosmetik di peredaran yang belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan dan mutu.

Belum optimalnya capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, kompetensi pelaku usaha dalam memahami regulasi, khususnya terkait penandaan (*labeling*), masih belum memadai, sehingga masih ditemukan ketidaksesuaian dalam informasi produk dan klaim yang disampaikan. Kedua, pelaksanaan sampling yang belum sepenuhnya tajam pada produk berisiko tinggi, seperti produk impor, kontrak produksi, dan kuasa merek, menyebabkan potensi temuan produk tidak memenuhi syarat belum teridentifikasi secara maksimal.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain melalui rapat pembahasan intensifikasi penelusuran bahan berbahaya/dilarang dalam kosmetik guna memperkuat aspek pengawasan kandungan produk, pelaksanaan dialog interaktif dengan pelaku industri klinik kecantikan untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) dengan UPT dalam rangka penajaman perencanaan dan pelaksanaan sampling serta pengujian kosmetik.

4. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor

Indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor merupakan indikator yang menunjukkan efektivitas koordinasi dan sinergi antarinstansi dalam menindaklanjuti hasil pengawasan Badan POM. Semakin tinggi capaian indikator ini, semakin baik keterlibatan dan komitmen lintas sektor dalam mendukung pengawasan dan perlindungan kesehatan masyarakat.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan dan tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I

Tabel 19 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap target Triwulan I 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83,75	69,23	82,66	Cukup

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang masih di bawah target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 83,75%, realisasi mencapai 69,23%, dengan tingkat capaian sebesar 82,66% dan termasuk dalam kategori Cukup.

Capaian ini menunjukkan bahwa tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan oleh lintas sektor belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kompleksitas koordinasi antar instansi, perbedaan kewenangan, serta waktu yang dibutuhkan dalam proses tindak lanjut oleh masing-masing pemangku kepentingan. Selain itu, sebagian rekomendasi memerlukan proses administratif dan teknis yang lebih panjang sehingga belum dapat diselesaikan pada periode Triwulan I.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi Triwulan iini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 20 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang Ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor terhadap Target Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83.75	69.23	82.66	Akan Tercapai

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun masih memerlukan penguatan. Dari target tahunan sebesar 83,75%, realisasi yang dicapai hingga Triwulan I adalah sebesar 69,23%, dengan capaian kinerja sebesar 82,66%.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar rekomendasi hasil pengawasan telah ditindaklanjuti oleh lintas sektor, namun masih terdapat gap yang perlu ditutup untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini dapat dipengaruhi oleh tingkat koordinasi, komitmen, serta kecepatan respons dari instansi atau pihak terkait dalam menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan.

Berdasarkan capaian hingga Triwulan I, dapat disimpulkan bahwa indikator ini berpotensi untuk mencapai target pada akhir tahun 2026, namun memerlukan upaya penguatan

koordinasi lintas sektor secara lebih intensif. Strategi yang perlu dilakukan antara lain peningkatan komunikasi dan monitoring tindak lanjut, penetapan mekanisme evaluasi berkala, serta penguatan sinergi dengan pemangku kepentingan agar seluruh rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara optimal dan tepat waktu.

Analisis Penyebab kegagalan dan upaya upaya yang dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi, dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 82,66% menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun belum optimal untuk mencapai target yang ditetapkan. Dari total 91 rekomendasi yang diberikan, sebanyak 63 rekomendasi telah ditindaklanjuti atau sebesar 69,23%, yang menunjukkan masih terdapat rekomendasi yang belum ditindaklanjuti secara maksimal oleh lintas sektor.

Belum optimalnya capaian ini terutama disebabkan oleh kendala dalam proses tindak lanjut oleh lintas sektor, khususnya pihak *marketplace*. Hambatan tersebut muncul karena adanya perbedaan persepsi dalam menilai tingkat risiko terhadap pelanggaran, terutama terkait iklan yang tidak memenuhi ketentuan. Perbedaan pemahaman ini berdampak pada variasi dalam tingkat urgensi penanganan, sehingga respons dan kecepatan tindak lanjut terhadap rekomendasi yang disampaikan menjadi kurang optimal. Akibatnya, sebagian temuan hasil pengawasan belum sepenuhnya ditindaklanjuti sesuai dengan target waktu dan kualitas yang diharapkan.

Selain itu, belum optimalnya capaian juga dipengaruhi oleh belum terstandarnya mekanisme koordinasi dan monitoring tindak lanjut antar lintas sektor, sehingga proses komunikasi, pelacakan progres, dan penyelesaian rekomendasi belum berjalan secara konsisten dan terintegrasi. Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan koordinasi, harmonisasi persepsi risiko, serta penyusunan mekanisme bersama yang lebih jelas antara BPOM dan lintas sektor, khususnya *marketplace*.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan, antara lain melalui penetapan PIC (person in charge) pada masing-masing lintas sektor guna memperjelas penanggung jawab dalam proses koordinasi dan monitoring tindak lanjut rekomendasi. Dengan adanya PIC, setiap rekomendasi dapat ditindaklanjuti secara lebih terarah dan akuntabel. Selain itu, langkah ini juga mendorong peningkatan efektivitas komunikasi antar pihak, sehingga proses pemantauan menjadi lebih terstruktur dan potensi keterlambatan atau ketidaksesuaian tindak lanjut dapat diminimalkan.

5. Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu ukuran efektivitas pengawasan Deputi II BPOM terhadap fasilitas produksi OBA dalam memenuhi persyaratan teknis dan regulasi yang ditetapkan, termasuk penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB). Indikator ini menjadi penting karena secara langsung berkaitan dengan jaminan mutu dan keamanan produk OBA yang dikonsumsi masyarakat.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan dan tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I

Tabel 21 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan I 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87,00	75,93	87,28	cukup

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang masih di bawah target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 87,00%, realisasi mencapai 75,93%, dengan tingkat capaian sebesar 87,28% dan termasuk dalam kategori Cukup.

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan sarana produksi Obat Bahan Alam terhadap standar yang dipersyaratkan belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih ditemukannya ketidaksesuaian dalam penerapan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB), termasuk aspek administratif, sanitasi, serta pemeliharaan sertifikasi yang belum konsisten. Selain itu, intensifikasi pengawasan yang menyasar sarana berisiko tinggi juga berkontribusi terhadap meningkatnya temuan ketidaksesuaian.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi Triwulan iini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 22 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87,00	75,93	87,28	Akan Tercapai

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari target

tahunan sebesar 87,00%, realisasi yang dicapai hingga Triwulan I adalah sebesar 75,93%, dengan capaian kinerja sebesar 87,28%.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar sarana produksi Obat Bahan Alam telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, meskipun masih terdapat selisih yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target secara penuh. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap sarana produksi telah berjalan dengan baik, namun masih memerlukan penguatan terutama dalam memastikan kepatuhan sarana yang belum memenuhi standar.

Berdasarkan capaian hingga Triwulan I, dapat disimpulkan bahwa indikator ini berpotensi untuk mencapai target pada akhir tahun 2026, dengan catatan diperlukan upaya lanjutan yang konsisten. Penguatan pembinaan teknis, peningkatan intensitas pengawasan berbasis risiko, serta pendampingan kepada pelaku usaha menjadi langkah strategis untuk memastikan seluruh sarana produksi dapat memenuhi ketentuan secara optimal.

Analisis penyebab kegagalan dan upaya yang dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 87,28% menunjukkan kinerja yang cukup baik, namun belum optimal untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dari total 54 sarana yang diperiksa, sebanyak 41 sarana memenuhi ketentuan atau sebesar 75,93%, yang menunjukkan masih terdapat sarana produksi yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang berlaku.

Belum optimalnya capaian ini dipengaruhi oleh masih ditemukannya 13 sarana yang tidak memenuhi ketentuan (TMK) dengan variasi jenis temuan. Temuan terbesar berasal dari aspek Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik (CPOBAB) yaitu sebanyak 5 sarana (39%), yang menunjukkan masih adanya kelemahan dalam penerapan standar produksi yang baik, seperti aspek fasilitas, proses produksi, maupun dokumentasi. Selain itu, terdapat temuan terkait TIE (3 sarana/23%) dan perizinan (3 sarana/23%), yang mengindikasikan masih adanya ketidaksesuaian dalam pemenuhan aspek administratif dan legalitas. Adapun temuan CPOBAB habis sebesar 2 sarana (15%) menunjukkan adanya sarana yang masa berlaku sertifikasinya telah berakhir namun belum dilakukan pembaruan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa tingkat kepatuhan sarana produksi, khususnya pada pelaku usaha skala UMKM, masih perlu ditingkatkan baik dari sisi teknis maupun administratif. Selain itu, masih diperlukan penguatan pembinaan yang lebih terarah dan berkelanjutan agar sarana produksi mampu memenuhi standar yang ditetapkan secara konsisten.

Sebagai upaya perbaikan, telah dilakukan persiapan pelaksanaan penguatan pembinaan melalui sinergi antara fungsi pengawasan dan pemberdayaan, khususnya dalam rangka meningkatkan kepatuhan UMKM Obat Bahan Alam. Pendekatan ini diarahkan untuk tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memberikan pendampingan yang lebih intensif kepada pelaku usaha, sehingga mampu memahami dan menerapkan standar CPOBAB serta memenuhi aspek perizinan secara tepat.

6. Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan fasilitas produksi suplemen kesehatan terhadap regulasi yang berlaku, termasuk penerapan Cara Pembuatan Produk yang Baik (CPPKB). Indikator ini bertujuan untuk menggambarkan sejauh mana pelaku usaha telah memenuhi ketentuan teknis produksi, seperti kesesuaian sarana dan prasarana, dokumentasi mutu, serta pengendalian proses produksi.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan dan tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I

Tabel 23 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan I Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86.60	0,00	0,00	Kurang

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 belum menunjukkan capaian sesuai target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 86,60%, realisasi masih 0,00%, sehingga tingkat capaian juga sebesar 0,00% dan termasuk dalam kategori Kurang.

Belum adanya realisasi pada indikator ini disebabkan oleh kegiatan pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang belum dilaksanakan pada Triwulan I, yang umumnya masih berada pada tahap perencanaan, penjadwalan inspeksi, atau persiapan teknis pelaksanaan di lapangan. Selain itu, faktor administratif dan pengaturan prioritas kegiatan pada awal tahun turut memengaruhi belum terlaksananya pengukuran indikator ini.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi Triwulan iini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 24 : Perbandingan realisasi kinerja Sarana Produksi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86.60	0	0	Perlu Upaya Keras

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan belum terdapat realisasi.

Belum adanya realisasi pada periode awal tahun ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan atau penilaian terhadap sarana produksi Suplemen Kesehatan belum berjalan optimal atau belum menghasilkan output yang dapat dihitung sebagai capaian indikator. Hal ini dapat disebabkan oleh faktor perencanaan waktu pelaksanaan kegiatan yang terjadwal pada triwulan berikutnya, keterbatasan pelaksanaan inspeksi, atau masih dalam tahap persiapan dan koordinasi.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa indikator ini memerlukan upaya keras untuk dapat mencapai target pada akhir tahun 2026. Diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pengawasan, peningkatan intensitas inspeksi sarana produksi, serta penguatan koordinasi dan pembinaan kepada pelaku usaha agar capaian indikator dapat segera terealisasi dan mendekati target yang telah ditetapkan.

Analisis penyebab keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 0% menunjukkan bahwa belum terdapat realisasi capaian pada periode ini. Dari total 0 sarana yang diperiksa dan 0 sarana yang memenuhi ketentuan, kondisi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan pengawasan belum menghasilkan output yang dapat dihitung sebagai capaian kinerja pada Triwulan I.

Tidak tercapainya capaian pada periode ini bukan semata disebabkan oleh tidak dilaksanakannya kegiatan pengawasan, melainkan lebih dipengaruhi oleh faktor waktu pelaksanaan dan keterlambatan pelaporan hasil inspeksi. Beberapa UPT menjadwalkan pelaksanaan inspeksi pada bulan Maret 2026, sementara Service Level Agreement (SLA) pelaporan hasil inspeksi adalah 20 hari kerja, sehingga hasil inspeksi tersebut baru dapat dilaporkan dan dievaluasi pada bulan April, dan tidak masuk dalam perhitungan capaian Triwulan I. Selain itu, terdapat kendala teknis dalam proses pelaporan melalui sistem SIPT, khususnya pada hasil inspeksi bulan Februari, sehingga data belum dapat diolah dan dievaluasi pada periode pelaporan yang sama.

Kondisi ini menunjukkan bahwa rendahnya capaian lebih disebabkan oleh aspek administratif dan sistem pelaporan, bukan karena tidak dilaksanakannya kegiatan pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dalam sinkronisasi jadwal pelaksanaan kegiatan dengan timeline pelaporan, serta peningkatan keandalan sistem pendukung.

Sebagai upaya perbaikan, telah dilakukan pelaporan kendala teknis melalui sistem IT Service Management (ITSM) kepada Pusdatin untuk segera dilakukan perbaikan pada aplikasi SIPT, sehingga proses pelaporan dapat berjalan lebih lancar dan tepat waktu. Selain itu, diperlukan penyesuaian perencanaan pelaksanaan inspeksi agar hasil kegiatan dapat terlaporkan dalam periode yang sama, sehingga capaian kinerja dapat tercermin secara lebih akurat.

7. Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan efektivitas pengawasan terhadap kepatuhan industri kosmetik dalam menerapkan persyaratan teknis produksi, termasuk penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Capaian indikator ini sangat penting karena berkontribusi langsung terhadap jaminan mutu, keamanan, dan legalitas produk kosmetik yang beredar di masyarakat.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan dan tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I

Tabel 25 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan I Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82,00	77,55	94,57	Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang mendekati target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 82,00%, realisasi mencapai 77,55%, dengan tingkat capaian sebesar 94,57% dan termasuk dalam kategori Baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar sarana produksi kosmetik telah memenuhi standar yang dipersyaratkan, meskipun masih terdapat selisih yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target secara penuh. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih ditemukannya ketidaksesuaian dalam penerapan Cara Pembuatan Kosmetik yang

Baik (CPKB), terutama pada sarana dengan tingkat kepatuhan yang belum optimal atau yang menjadi prioritas pengawasan berbasis risiko.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi Triwulan iini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 26 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Sarana Produksi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82,00	77,55	94,57	Akan Tercapai

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari target tahunan sebesar 82,00%, realisasi yang dicapai hingga Triwulan I adalah sebesar 77,55%, dengan capaian kinerja sebesar 94,57%.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar sarana produksi kosmetik telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan, meskipun masih terdapat selisih yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan dan pembinaan terhadap sarana produksi kosmetik telah berjalan dengan baik, namun masih diperlukan penguatan pada sarana yang belum sepenuhnya memenuhi standar.

Berdasarkan capaian hingga Triwulan I, dapat disimpulkan bahwa indikator ini berpotensi untuk mencapai target pada akhir tahun 2026, dengan catatan diperlukan upaya lanjutan yang konsisten. Peningkatan intensitas pengawasan berbasis risiko, pembinaan teknis kepada pelaku usaha, serta penguatan kepatuhan terhadap standar produksi menjadi langkah penting untuk memastikan target dapat tercapai secara maksimal.

Analisis penyebab kegagalan dan upaya yang dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 94,57% menunjukkan kinerja yang cukup baik dan mendekati target, namun belum optimal untuk melampaui target yang ditetapkan. Dari total 49 sarana yang diperiksa, sebanyak 38 sarana memenuhi ketentuan atau

sebesar 77,55%, yang menunjukkan masih terdapat sarana produksi yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang berlaku.

Belum optimalnya capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pertumbuhan industri kosmetik yang cukup pesat belum sepenuhnya diimbangi dengan pemahaman pelaku usaha terhadap regulasi, khususnya terkait penerapan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Hal ini menyebabkan masih ditemukannya ketidaksesuaian pada aspek teknis produksi, sistem mutu, maupun dokumentasi. Kedua, adanya penajaman analisis risiko oleh UPT dalam pelaksanaan pemeriksaan turut meningkatkan ketepatan sasaran pengawasan, sehingga lebih banyak sarana dengan potensi ketidaksesuaian teridentifikasi. Kondisi ini berdampak pada meningkatnya temuan sarana yang tidak memenuhi ketentuan, yang pada akhirnya mempengaruhi capaian indikator.

Untuk mengatasi kendala tersebut, telah dilakukan berbagai upaya perbaikan. Pertama, melalui pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi (monev) dengan UPT, guna memperkuat perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana produksi agar lebih terarah dan berbasis risiko. Kedua, pelaksanaan pelatihan inspektur kosmetik junior untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan secara lebih komprehensif dan sesuai standar, sehingga kualitas pengawasan dapat terus ditingkatkan.

8. Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator penting dalam menilai efektivitas pengawasan Deputi II BPOM terhadap rantai distribusi produk OBA. Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan fasilitas distribusi terhadap persyaratan teknis, administratif, dan kualitas yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk aspek penyimpanan, pengangkutan, pencatatan, dan dokumentasi distribusi.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan dan tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I

Tabel 27 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan I Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66,00	72,11	109,26	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 66,00%, realisasi mencapai 72,11%, dengan tingkat capaian sebesar 109,26% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan fasilitas distribusi Obat Bahan Alam terhadap standar yang dipersyaratkan telah berada pada kondisi yang sangat baik. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pengawasan distribusi yang dilakukan, termasuk penerapan pendekatan berbasis risiko dalam penentuan prioritas pemeriksaan serta penguatan koordinasi dengan UPT dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi Triwulan iini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 28 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66,00	72,11	109,26	Tercapai / Melampaui

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target tahunan sebesar 66,00%, realisasi yang dicapai telah mencapai 72,11%, dengan capaian kinerja sebesar 109,26%.

Capaian yang melampaui target pada awal tahun ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas distribusi Obat Bahan Alam, serta meningkatnya tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan bahwa strategi pengawasan berbasis risiko dan pembinaan yang dilakukan telah memberikan hasil yang optimal.

Berdasarkan capaian hingga Triwulan I, dapat disimpulkan bahwa indikator ini sangat berpotensi untuk tercapat bahkan melampaui target pada akhir tahun 2026. Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi kinerja dan memastikan kualitas pengawasan tetap terjaga, sehingga capaian yang tinggi ini dapat dipertahankan secara berkelanjutan.

Analisis penyebab keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 109,26%, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Dari total 251 sarana yang diperiksa, sebanyak 181 sarana memenuhi ketentuan atau sebesar 72,11%, yang mencerminkan tingkat kepatuhan fasilitas distribusi yang cukup tinggi terhadap ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan ini didukung oleh implementasi rekomendasi suprasistem, khususnya dari BPK, terkait perencanaan inspeksi sarana distribusi yang dilakukan secara berbasis risiko (*risk-based inspection*). Pendekatan ini memungkinkan kegiatan pengawasan difokuskan pada sarana distribusi dengan tingkat risiko lebih tinggi, sehingga pelaksanaan inspeksi menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan. Selain itu, penerapan perencanaan berbasis risiko juga mendorong optimalisasi sumber daya pengawasan, sehingga hasil yang dicapai menjadi lebih maksimal.

Keberhasilan capaian ini juga didukung oleh upaya yang telah dilakukan melalui desk perencanaan pelaksanaan inspeksi (renlak) berbasis risiko dengan seluruh UPT. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pengawasan di tingkat pusat dan daerah, memastikan keseragaman pemahaman dalam penerapan pendekatan berbasis risiko, serta meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan inspeksi di lapangan.

9. Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas pengawasan post-market Deputi II BPOM, khususnya dalam memastikan bahwa proses distribusi produk suplemen kesehatan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan pelaku usaha distribusi terhadap aspek legalitas, pencatatan, sistem penyimpanan, pelacakan produk, dan pemenuhan standar fasilitas distribusi.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan dan tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I

Tabel 29 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Triwulan I tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93,00	94,12	101,20	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 93,00%, realisasi mencapai 94,12%, dengan tingkat capaian sebesar 101,20% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan fasilitas distribusi suplemen kesehatan terhadap standar yang dipersyaratkan telah berada pada kondisi yang sangat baik. Hal ini menunjukkan efektivitas pelaksanaan pengawasan distribusi serta meningkatnya kesadaran pelaku usaha dalam menjaga mutu produk selama proses penyimpanan dan penyaluran.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi Triwulan iini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 30 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93,00	94,12	101,20	Tercapai / Melampaui

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target tahunan sebesar 93,00%, realisasi yang dicapai telah mencapai 94,12%, dengan capaian kinerja sebesar 101,20%.

Capaian yang telah melampaui target pada awal tahun ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas distribusi suplemen kesehatan berjalan secara efektif, serta didukung oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha yang tinggi terhadap ketentuan yang berlaku. Hal ini juga menunjukkan optimalnya strategi pengawasan dan pembinaan yang telah diterapkan.

Berdasarkan capaian hingga Triwulan I, dapat disimpulkan bahwa indikator ini sangat berpotensi untuk tarcapat bahkan melampaui target pada akhir tahun 2026. Untuk itu, diperlukan upaya menjaga konsistensi kinerja serta memastikan kualitas pengawasan tetap terjaga, sehingga capaian yang telah baik ini dapat dipertahankan dan memberikan dampak yang berkelanjutan.

Analisis penyebab keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 101,20%, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Dari total 102 sarana yang diperiksa, sebanyak 96 sarana memenuhi ketentuan atau sebesar 94,12%, yang menunjukkan tingkat kepatuhan fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang sangat tinggi terhadap ketentuan yang berlaku.

Keberhasilan ini didukung oleh implementasi rekomendasi suprasistem, khususnya dari BPK, terkait perencanaan inspeksi sarana distribusi yang dilakukan secara berbasis risiko (risk-based inspection). Pendekatan ini memungkinkan pengawasan difokuskan pada sarana dengan tingkat risiko lebih tinggi, sehingga meningkatkan efektivitas inspeksi dan mendorong perbaikan kepatuhan secara lebih signifikan. Selain itu, penerapan perencanaan berbasis risiko juga berkontribusi dalam optimalisasi sumber daya pengawasan serta meningkatkan kualitas hasil inspeksi di lapangan.

Keberhasilan capaian ini juga diperkuat melalui upaya yang telah dilakukan, yaitu pelaksanaan desk perencanaan pelaksanaan inspeksi (renlak) berbasis risiko dengan seluruh UPT. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan perencanaan pengawasan antara pusat dan daerah, meningkatkan keseragaman pemahaman terhadap pendekatan berbasis risiko, serta memastikan pelaksanaan inspeksi dilakukan secara lebih terarah dan terukur.

10. Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator yang digunakan untuk menilai efektivitas pengawasan Deputi II BPOM terhadap kepatuhan sarana distribusi kosmetik terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Indikator ini mencakup pemenuhan aspek legalitas, sistem penyimpanan yang sesuai, ketertelusuran produk, pencatatan distribusi, serta kelayakan fasilitas fisik dan manajemen mutu distribusi kosmetik.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan dan tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I

Tabel 31 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan I Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	74,00	70,15	94,80	Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang mendekati target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 74,00%, realisasi mencapai 70,15%, dengan tingkat capaian sebesar 94,80% dan termasuk dalam kategori Baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas distribusi kosmetik telah memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan, meskipun masih terdapat selisih yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target secara penuh. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih adanya pelaku usaha distribusi, khususnya skala kecil, yang belum sepenuhnya konsisten dalam menerapkan standar distribusi yang baik.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi Triwulan iini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 32 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	74,00	70,15	94,80	Akan Tercapai

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang cukup baik. Dari target tahunan sebesar 74,00%, realisasi yang dicapai hingga Triwulan I adalah sebesar 70,15%, dengan capaian kinerja sebesar 94,80%.

Capaian yang telah mendekati target menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan terhadap fasilitas distribusi kosmetik telah berjalan secara efektif, meskipun masih terdapat selisih yang perlu ditingkatkan untuk mencapai target secara optimal. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar fasilitas distribusi telah memenuhi ketentuan, namun masih diperlukan penguatan pada fasilitas yang belum sepenuhnya patuh.

Berdasarkan capaian hingga Triwulan I, dapat disimpulkan bahwa indikator ini berpotensi untuk mencapai target pada akhir tahun 2026, dengan catatan diperlukan upaya lanjutan yang konsisten. Penguatan pengawasan berbasis risiko, peningkatan intensitas pembinaan, serta koordinasi dengan pelaku usaha menjadi langkah penting untuk memastikan target dapat tercapai secara maksimal.

Analisis penyebab kegagalan dan upaya yang dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 94,80% menunjukkan kinerja yang cukup baik dan mendekati target, namun belum optimal untuk melampaui target yang ditetapkan. Dari total 546 sarana yang diperiksa, sebanyak 383 sarana memenuhi ketentuan atau sebesar 70,15%, yang menunjukkan masih terdapat sarana distribusi yang belum sepenuhnya memenuhi persyaratan yang berlaku.

Belum optimalnya capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, pertumbuhan jumlah sarana distribusi kosmetik yang cukup pesat tidak sepenuhnya diimbangi dengan tingkat kepatuhan terhadap regulasi, sehingga masih ditemukan banyak ketidaksesuaian di lapangan. Kedua, mayoritas pelanggaran berasal dari sarana distribusi tingkat pengecer, yang umumnya memiliki tingkat pemahaman dan kepatuhan regulasi yang lebih rendah dibandingkan distributor utama. Ketiga, adanya penajaman analisis risiko oleh UPT dalam pelaksanaan pemeriksaan menyebabkan pengawasan lebih terfokus pada sarana dengan potensi pelanggaran tinggi, sehingga meningkatkan temuan sarana yang tidak memenuhi ketentuan. Kondisi ini, meskipun berdampak pada capaian indikator, justru menunjukkan bahwa pengawasan telah berjalan lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengidentifikasi permasalahan di lapangan.

Sebagai upaya perbaikan, telah dilakukan rapat monitoring dan evaluasi (monev) dengan UPT untuk memperkuat perencanaan dan pelaksanaan pengawasan sarana distribusi agar lebih terarah dan berbasis risiko. Selain itu, dilakukan pelatihan inspektur kosmetik junior untuk meningkatkan kompetensi petugas dalam melakukan pemeriksaan secara lebih komprehensif dan sesuai standar, sehingga kualitas pengawasan dapat terus ditingkatkan.

11. Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Obat Bahan Alam (OBA) yang Memenuhi Ketentuan digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan produk OBA yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pengawasan terhadap iklan OBA bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat bersifat objektif, tidak menyesatkan, dan tidak mengandung klaim berlebihan yang dapat membahayakan konsumen atau menurunkan kepercayaan terhadap produk legal.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan dan tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I

Tabel 33 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan I Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67,00	54,72	81,67	Cukup

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang masih di bawah target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 67,00%, realisasi mencapai 54,72%, dengan tingkat capaian sebesar 81,67% dan termasuk dalam kategori Cukup.

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan iklan Obat Bahan Alam sesuai ketentuan masih belum optimal. Kondisi ini dipengaruhi oleh tingginya dinamika promosi di media digital serta masih adanya praktik klaim berlebihan yang dilakukan oleh pelaku usaha, khususnya pada segmen UMKM. Selain itu, keterlibatan pihak ketiga seperti *influencer* dalam promosi produk yang belum sepenuhnya memahami regulasi juga menjadi faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan periklanan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi Triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 34 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Obat Bahan Alam yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67,00	54,72	81,67	Akan Tercapai

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang cukup, namun masih memerlukan

penguatan. Dari target tahunan sebesar 67,00%, realisasi yang dicapai hingga Triwulan I adalah sebesar 54,72%, dengan capaian kinerja sebesar 81,67%.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian iklan Obat Bahan Alam telah memenuhi ketentuan yang berlaku, namun masih terdapat proporsi yang cukup signifikan yang belum sesuai, sehingga memerlukan peningkatan pengawasan dan pembinaan. Kondisi ini dapat dipengaruhi oleh masih adanya pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami atau mematuhi ketentuan periklanan, khususnya terkait klaim dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Berdasarkan capaian hingga Triwulan I, dapat disimpulkan bahwa indikator ini berpotensi untuk mencapai target pada akhir tahun 2026, namun memerlukan upaya yang lebih intensif. Penguatan pengawasan promosi, peningkatan literasi regulasi bagi pelaku usaha, serta penegakan kepatuhan melalui pendekatan pembinaan dan penindakan menjadi langkah strategis untuk memastikan target dapat tercapai secara optimal.

Analisis penyebab kegagalan dan upaya yang telah dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 81,67% menunjukkan kinerja yang cukup, namun belum optimal untuk mencapai target yang ditetapkan. Dari total 1.323 iklan yang diperiksa, sebanyak 724 iklan memenuhi ketentuan atau sebesar 54,72%, yang mengindikasikan masih tingginya proporsi iklan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Belum optimalnya capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya perubahan proporsi pengawasan berbasis risiko, dimana fokus pengawasan terhadap media internet meningkat signifikan dari 60% menjadi 79%, serta peningkatan target pada klaim berisiko tinggi dari 25% menjadi 27%. Penajaman ini menyebabkan pengawasan lebih terfokus pada segmen dengan potensi pelanggaran yang lebih tinggi, sehingga jumlah temuan iklan yang tidak memenuhi ketentuan meningkat. Kedua, tingginya pelanggaran pada iklan perseorangan, terutama di media digital, yang cenderung memiliki tingkat kepatuhan rendah serta membutuhkan proses tindak lanjut melalui koordinasi lintas sektor, sehingga tidak seluruh temuan dapat segera ditindaklanjuti dalam periode pelaporan.

Meskipun berdampak pada capaian indikator, kondisi ini mencerminkan bahwa pengawasan telah dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengidentifikasi pelanggaran di area berisiko tinggi. Hal ini merupakan bagian dari strategi penguatan pengawasan berbasis risiko untuk meningkatkan perlindungan masyarakat.

Sebagai upaya perbaikan, telah dilakukan penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran berulang guna memberikan efek jera kepada pelaku usaha. Selain itu, dilakukan kegiatan progresif kepada pelaku usaha untuk mempercepat tindak lanjut hasil pengawasan, termasuk peningkatan komunikasi dan koordinasi agar pelanggaran dapat segera diperbaiki.

12. Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan merupakan indikator yang bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam memasarkan produk suplemen kesehatan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Pengawasan terhadap iklan menjadi krusial karena iklan merupakan sarana utama penyampaian informasi kepada konsumen, dan pelanggaran dalam penyampaian pesan promosi dapat menyesatkan masyarakat serta berdampak pada keselamatan dan kepercayaan publik.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan dan tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I

Tabel 35 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap target Triwulan I Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83,00	66,84	80,53	Cukup

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang masih di bawah target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 83,00%, realisasi mencapai 66,84%, dengan tingkat capaian sebesar 80,53% dan termasuk dalam kategori Cukup.

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam penyampaian iklan suplemen kesehatan belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh masih maraknya penggunaan klaim berlebihan dalam promosi, khususnya pada media digital dan melalui pihak ketiga seperti influencer yang belum memiliki pemahaman memadai terhadap ketentuan regulasi. Selain itu, tingginya intensitas dan kecepatan penyebaran iklan di berbagai platform turut menjadi tantangan dalam pengawasan dan pengendalian konten promosi.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi Triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 36 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase Iklan Suplemen Kesehatan yang Memenuhi Ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83,00	66,84	80,53	Akan Tercapai

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang cukup, namun masih perlu ditingkatkan. Dari target tahunan sebesar 83,00%, realisasi yang dicapai hingga Triwulan I adalah sebesar 66,84%, dengan capaian kinerja sebesar 80,53%.

Capaian ini menunjukkan bahwa sebagian besar iklan Suplemen Kesehatan telah memenuhi ketentuan, namun masih terdapat gap yang perlu diperbaiki untuk mencapai target yang ditetapkan. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam aspek periklanan masih perlu diperkuat, khususnya terkait kesesuaian klaim, informasi produk, dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Berdasarkan capaian hingga Triwulan I, dapat disimpulkan bahwa indikator ini berpotensi untuk mencapai target pada akhir tahun 2026, namun memerlukan upaya yang lebih intensif dan konsisten. Penguatan pengawasan terhadap media promosi, peningkatan literasi regulasi bagi pelaku usaha, serta optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam pengendalian iklan menjadi langkah penting untuk memastikan target dapat tercapai secara optimal.

Analisis penyebab keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar 80,53% menunjukkan kinerja yang cukup, namun belum optimal untuk mencapai target yang ditetapkan. Dari total 591 iklan yang diperiksa, sebanyak 395 iklan memenuhi ketentuan atau sebesar 66,84%, yang menunjukkan masih terdapat proporsi pelanggaran yang cukup signifikan pada iklan suplemen kesehatan di peredaran.

Belum optimalnya capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama, adanya penajaman pengawasan berbasis risiko, dimana proporsi pengawasan pada media internet meningkat dari 60% menjadi 79%, serta peningkatan fokus pada klaim berisiko tinggi dari 25% menjadi 27%. Perubahan ini menyebabkan pengawasan lebih terkonsentrasi pada area dengan potensi pelanggaran tinggi, sehingga jumlah temuan iklan yang tidak memenuhi ketentuan menjadi lebih banyak. Kedua, tingginya pelanggaran pada iklan perseorangan, terutama di media digital, yang umumnya memiliki tingkat kepatuhan rendah serta memerlukan koordinasi lintas sektor dalam proses tindak lanjut, sehingga tidak seluruh pelanggaran dapat segera diselesaikan dalam periode pelaporan.

Meskipun berdampak pada capaian indikator, kondisi ini menunjukkan bahwa pengawasan telah dilakukan secara lebih tepat sasaran dan efektif dalam mengidentifikasi pelanggaran di area berisiko tinggi. Hal ini merupakan bagian dari strategi penguatan pengawasan untuk meningkatkan perlindungan masyarakat dari informasi produk yang menyesatkan.

Sebagai upaya perbaikan, telah dilakukan penegakan sanksi tegas terhadap pelanggaran berulang, guna memberikan efek jera dan mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan.

13. Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan

Indikator Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan merupakan salah satu ukuran penting dalam menilai efektivitas pengawasan promosi produk kosmetik di berbagai kanal, termasuk media cetak, elektronik, dan digital. Indikator ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada masyarakat terkait produk kosmetik telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak menyesatkan, tidak overclaim, dan tidak menyalahgunakan persepsi publik terhadap fungsi kosmetik.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan dan tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I

Tabel 37 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap target Triwulan I Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	61,00	61,25	100,41	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Iklan Kosmetik yang Memenuhi Ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 61,00%, realisasi mencapai 61,25%, dengan tingkat capaian sebesar 100,41% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan pelaku usaha dalam menyampaikan iklan kosmetik sesuai ketentuan telah berada pada kondisi yang sangat baik. Keberhasilan ini menunjukkan efektivitas pengawasan iklan yang dilakukan, khususnya pada media digital dan platform e-commerce, serta meningkatnya pemahaman pelaku usaha terhadap batasan klaim kosmetik yang diperbolehkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi Triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 38 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan terhadap Target Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	61,00	61,25	100,41	Tercapai / Melampaui

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target tahunan sebesar 61,00%, realisasi yang dicapai telah mencapai 61,25%, dengan capaian kinerja sebesar 100,41%.

Capaian yang telah melampaui target pada awal tahun ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap iklan kosmetik berjalan secara efektif, serta didukung oleh tingkat kepatuhan pelaku usaha yang baik terhadap ketentuan periklanan. Hal ini menunjukkan keberhasilan strategi pembinaan dan pengawasan yang telah dilaksanakan, termasuk dalam pengendalian klaim dan informasi yang disampaikan kepada masyarakat.

Berdasarkan capaian hingga Triwulan I, dapat disimpulkan bahwa indikator ini akan tercapai bahkan melampaui target pada akhir tahun 2026. Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi kinerja dan memastikan kualitas pengawasan tetap terjaga, sehingga capaian yang telah baik ini dapat dipertahankan dan terus memberikan dampak positif secara berkelanjutan.

Analisis penyebab keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 100,41%, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Dari total 2.111 iklan yang diperiksa, sebanyak 1.293 iklan memenuhi ketentuan atau sebesar 61,25%, yang mencerminkan tingkat kepatuhan yang cukup baik terhadap ketentuan periklanan kosmetik.

Keberhasilan ini didukung oleh penguatan pengawasan dan pembinaan iklan kosmetik yang dilakukan secara berkelanjutan. Pendekatan ini tidak hanya menekankan pada aspek penindakan, tetapi juga pada peningkatan pemahaman pelaku usaha terhadap ketentuan periklanan, termasuk kesesuaian klaim, informasi produk, dan ketentuan label.

Selain itu, konsistensi dalam pelaksanaan pengawasan turut mendorong pelaku usaha untuk lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku, sehingga secara agregat meningkatkan persentase iklan yang memenuhi ketentuan.

Keberhasilan capaian ini juga diperkuat melalui berbagai upaya yang telah dilakukan, antara lain pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi (monev) dengan UPT untuk memastikan perencanaan dan pelaksanaan pengawasan iklan kosmetik berjalan secara terarah dan efektif, serta pelaksanaan desk CAPA (*Corrective and Preventive Action*) sebagai tindak lanjut hasil pengawasan iklan. Melalui mekanisme CAPA, setiap temuan pelanggaran dapat segera ditindaklanjuti secara sistematis, sehingga mendorong perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha.

14. Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar

Indikator Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar merupakan salah satu indikator strategis yang menggambarkan efektivitas peran Deputi II BPOM dalam mendorong pengembangan inovasi produk berbasis Obat Bahan Alam yang memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan khasiat. Indikator ini tidak hanya menunjukkan jumlah inovasi yang didampingi, tetapi juga kualitas proses pendampingan yang dilakukan, mulai dari tahap penyusunan protokol penelitian hingga pemenuhan aspek uji praklinik dan uji klinik sesuai ketentuan yang berlaku.

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator ini menjadi penting untuk menunjukkan sejauh mana layanan regulatory assistance dan pendampingan teknis telah berjalan secara optimal dalam mendukung peneliti dan pelaku usaha. Melalui pendekatan pendampingan yang terstruktur dan berbasis standar, diharapkan inovasi yang dihasilkan tidak hanya berkembang secara ilmiah, tetapi juga siap untuk memasuki tahapan registrasi dan berkontribusi terhadap peningkatan daya saing industri Obat Bahan Alam di tingkat nasional maupun global.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan dan tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I

Tabel 39 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap Triwulan I Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91,00	91,09	100,10	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase Inovasi Obat Bahan Alam yang Didampingi Sesuai Standar pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 91,00%, realisasi mencapai 91,09%, dengan tingkat capaian sebesar 100,10% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa proses pendampingan inovasi Obat Bahan Alam telah berjalan secara optimal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, mulai dari tahap penyusunan protokol hingga pemenuhan aspek uji praklinik dan uji klinik. Hal ini menunjukkan efektivitas layanan pendampingan yang diberikan serta meningkatnya kesiapan peneliti dan pelaku usaha dalam mengembangkan produk yang memenuhi persyaratan regulatori.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi Triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 40 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar terhadap target tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91,00	91,09	100,10	Tercapai / Melampaui

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase inovasi Obat Bahan Alam yang didampingi sesuai standar menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dari target tahunan sebesar 91,00%, realisasi yang dicapai telah mencapai 91,09%, dengan capaian kinerja sebesar 100,10%.

Capaian yang telah melampaui target pada awal tahun ini menunjukkan bahwa proses pendampingan inovasi Obat Bahan Alam telah dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan optimalnya peran pembinaan dan fasilitasi yang diberikan kepada pelaku usaha, sehingga mampu menghasilkan inovasi yang memenuhi aspek keamanan, mutu, dan manfaat.

Berdasarkan capaian hingga Triwulan I, dapat disimpulkan bahwa indikator ini akan tercapai bahkan atau berpotensi untuk melampaui target pada akhir tahun 2026. Ke depan, diperlukan upaya untuk menjaga konsistensi kualitas pendampingan serta memperluas jangkauan pembinaan, sehingga tidak hanya mempertahankan capaian yang tinggi, tetapi juga meningkatkan daya saing produk Obat Bahan Alam secara berkelanjutan.

Analisis penyebab kegagalan dan upaya yang dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase inovasi Obat Bahan Alam yang didampingi sesuai standar pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 100,10%, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa proses pendampingan inovasi telah dilaksanakan secara efektif dan mampu memastikan pemenuhan standar keamanan, mutu, dan khasiat dalam pengembangan produk Obat Bahan Alam.

Keberhasilan ini didukung oleh intensifikasi kegiatan pendampingan yang dilakukan secara proaktif dan adaptif, antara lain melalui program PEDULI RISET (Pendampingan Uji Praklinik dan Uji Klinik kepada Industri serta Peneliti) dan ProAKSI BERPADU. Pendampingan dilakukan baik secara luring maupun daring dengan memanfaatkan platform yang stabil, sehingga mampu memperluas jangkauan dan meningkatkan partisipasi peneliti serta pelaku usaha. Selain itu, meningkatnya kepatuhan terhadap regulasi, khususnya terkait uji toksisitas, uji farmakodinamik, dan uji klinik, turut berkontribusi terhadap peningkatan kualitas inovasi yang didampingi.

Keberhasilan capaian ini juga didukung oleh layanan konsultasi yang efektif melalui berbagai kanal, seperti email, Zoom, dan WhatsApp, yang memudahkan akses informasi dan komunikasi antara regulator dengan pelaku usaha dan peneliti. Di sisi lain, sosialisasi berkala di berbagai daerah serta pelaksanaan webinar uji praklinik farmakodinamik telah meningkatkan pemahaman terhadap metode uji dan persyaratan regulasi. Seluruh kegiatan tersebut diperkuat dengan monitoring dan evaluasi capaian secara bulanan, sehingga pelaksanaan pendampingan dapat terus dipantau dan disesuaikan secara tepat waktu.

Sebagai bentuk implementasi nyata, pada Triwulan I telah dilaksanakan beberapa kegiatan pendampingan, antara lain pendampingan UK Mom Uung, pendampingan Poltekkes Surakarta, serta pendampingan uji klinik probiotik. Kegiatan-kegiatan ini menunjukkan komitmen dalam memberikan fasilitasi langsung kepada pelaku usaha dan peneliti agar proses pengembangan inovasi berjalan sesuai standar.

15. Persentase Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik

Indikator Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik merupakan indikator strategis yang menggambarkan tingkat kepatuhan serta kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah dalam memenuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB). Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai efektivitas program pembinaan, pendampingan teknis, serta fasilitasi regulasi yang dilaksanakan oleh Deputi II BPOM dalam mendorong peningkatan kualitas produksi di tingkat UMKM.

Realisasi capaian pada indikator ini tidak hanya menunjukkan tingkat kepatuhan administratif, tetapi juga menunjukkan adanya perbaikan sistem manajemen mutu, pengendalian proses produksi, serta komitmen UMKM dalam menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar. Dengan meningkatnya jumlah UMKM yang menerapkan standar, diharapkan tercipta ekosistem industri Obat Bahan Alam dan Kosmetik yang lebih

kompetitif, berdaya saing, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Oleh karena itu, capaian indikator ini menjadi bagian penting dalam mengukur dampak nyata intervensi pengawasan dan pemberdayaan yang dilakukan sepanjang tahun berjalan.

Berikut analisis terhadap realisasi kinerja indikator ini, dan perbandingannya terhadap target triwulan dan tahun berjalan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Triwulan I

Tabel 41 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap target Triwulan I 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	4,00	4,17	104,25	Sangat Baik

Realisasi kinerja pada indikator Persentase UMKM yang Menerapkan Standar Keamanan dan Mutu Produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan capaian yang melampaui target yang telah ditetapkan. Dari target sebesar 4,00%, realisasi mencapai 4,17%, dengan tingkat capaian sebesar 104,25% dan termasuk dalam kategori Sangat Baik.

Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pembinaan dan pendampingan terhadap UMKM dalam penerapan standar keamanan dan mutu produksi telah berjalan secara efektif. Peningkatan ini menunjukkan semakin baiknya pemahaman dan kesadaran pelaku usaha dalam memenuhi ketentuan Cara Pembuatan Obat Tradisional yang Baik (CPOTB) dan Cara Pembuatan Kosmetika yang Baik (CPKB), serta komitmen dalam menjaga kualitas produk yang dihasilkan.

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Triwulan Sebelumnya

Realisasi Triwulan ini tidak dapat dibandingkan dengan triwulan sebelumnya

Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Tahunan

Tabel 42 : Perbandingan realisasi kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik terhadap Target Tahun 2026

IKU	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori / Notifikasi Warna
Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik	64,50	4,17	6,47	Perlu Upaya keras

Pada Triwulan I Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik masih sangat rendah. Dari target tahunan sebesar 64,50%, realisasi yang dicapai hingga Triwulan I baru sebesar 4,17%, dengan capaian kinerja sebesar 6,47%.

Rendahnya capaian pada periode awal tahun ini menunjukkan bahwa implementasi standar keamanan dan mutu oleh UMKM masih belum optimal. Hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan pemahaman pelaku UMKM terhadap regulasi, kesiapan sarana produksi yang belum memenuhi ketentuan, serta belum optimalnya pelaksanaan pembinaan dan pendampingan secara luas dan intensif.

Berdasarkan capaian hingga Triwulan I, dapat disimpulkan bahwa indikator ini memerlukan upaya keras untuk dapat mencapai target pada akhir tahun 2026. Diperlukan strategi percepatan yang lebih agresif, antara lain melalui peningkatan intensitas pembinaan dan pendampingan, penguatan literasi regulasi, perluasan jangkauan fasilitasi kepada UMKM, serta kolaborasi dengan lintas sektor untuk mendorong percepatan penerapan standar keamanan dan mutu produksi secara lebih masif dan berkelanjutan.

Analisis penyebab keberhasilan dan upaya yang dilakukan

Capaian indikator kinerja Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam (OBA) dan Kosmetik pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan capaian sebesar 104,25%, sehingga telah melampaui target yang ditetapkan. Dari total 120 UMKM yang didampingi, sebanyak 5 UMKM telah berhasil menerapkan standar atau sebesar 4,17%, yang telah memenuhi target capaian pada periode ini.

Keberhasilan ini didukung oleh perencanaan pendampingan yang lebih terarah dan berbasis kapasitas UPT, melalui pembahasan target UMKM bersama UPT serta Biro Perencanaan dan Keuangan. Langkah ini memungkinkan penetapan target yang lebih realistis dan sesuai dengan kemampuan pendampingan di lapangan. Selain itu, peningkatan kualitas pendampingan juga didorong oleh pelaksanaan bimbingan teknis

(bimtek) fasilitator UMKM OBA dan Kosmetik, yang bertujuan meningkatkan kompetensi fasilitator dalam memberikan pembinaan kepada pelaku usaha.

Keberhasilan capaian juga diperkuat melalui penguatan dan perluasan program pendampingan UMKM, antara lain melalui coaching fasilitator serta penyempurnaan pedoman teknis (juknis) pemberdayaan pelaku usaha. Upaya ini berkontribusi dalam meningkatkan efektivitas pendampingan, sehingga UMKM dapat lebih memahami dan menerapkan standar keamanan dan mutu produksi secara bertahap.

Sebagai bentuk implementasi, telah dilakukan berbagai upaya strategis, antara lain pelaksanaan bimtek fasilitator UMKM OBA dan Kosmetik, pembahasan target UMKM bersama UPT dan Biro Perencanaan dan Keuangan, serta finalisasi dan pencetakan revisi Modul OBA Tahun 2026 sebagai panduan dalam pelaksanaan pendampingan.

3.2 Tindak lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi

Matriks tindak lanjut rekomendasi dan hasil Evaluasi pada triwulan I 2026 adalah sebagaimana pada lampiran (belum terdapat hasil evaluasi rekomendasi tindak lanjut pada triwulan ini).

3.3 Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2026, Deputi II BPOM memperoleh pagu anggaran sebesar Rp25.685.809.000, dengan Rp4.268.995.000 di antaranya tidak dapat digunakan (diblokir), sehingga pagu efektif menjadi Rp21.495.552.000. Hingga Triwulan I Tahun 2026, realisasi anggaran mencapai Rp3.791.621.585 atau 17,64% dari pagu efektif. Capaian ini menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih berada pada fase awal pelaksanaan, dan sesuai bahkan lebih tinggi dari target realisasi anggaran pada triwulan I yaitu 15%.

Secara analitis, realisasi anggaran pada periode ini karena sebagian besar kegiatan masih berada pada tahap persiapan, seperti perencanaan kegiatan, serta proses pengadaan barang dan jasa. Selain itu, sejumlah kegiatan utama memang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada triwulan berikutnya, sehingga kontribusinya terhadap realisasi anggaran pada Triwulan I masih terbatas. Dengan demikian, kondisi ini lebih dipengaruhi oleh faktor waktu pelaksanaan kegiatan, bukan karena adanya hambatan dalam pengelolaan anggaran.

Untuk memastikan optimalisasi penyerapan anggaran pada periode selanjutnya, Deputi II BPOM telah melakukan langkah-langkah pengendalian, antara lain percepatan perencanaan kegiatan, penguatan monitoring dan evaluasi, serta peningkatan koordinasi antar unit kerja. Upaya ini diharapkan dapat mendorong percepatan realisasi anggaran pada triwulan berikutnya, sehingga pelaksanaan program berjalan efektif dan target kinerja dapat tercapai secara optimal.

Realisasi anggaran per Sasaran Program

Realisasi anggaran Deputi II BPOM pada Triwulan I Tahun 2026 sebesar Rp3.791.621.585 atau 17,64% dari total pagu Rp21.495.552.000 menunjukkan bahwa penyerapan anggaran masih berada pada tahap awal pelaksanaan kegiatan. Jika dianalisis per sasaran program, terdapat variasi tingkat realisasi yang mencerminkan perbedaan progres pelaksanaan kegiatan pada masing-masing sasaran.

Realisasi anggaran per sasaran program pada triwulan I tahun 2026 adalah sebagaimana tertera pada tabel berikut:

Tabel 43 : Realisasi Anggaran per Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Program	Pagu Anggaran	Realisasi	% ase
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	7,805,662,000	907,393,156	11.62%
2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	286,544,000	6,156,488	2.15%
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	2,464,329,000	259,988,784	10.55%
4	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industry dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	3,013,091,000	624,369,833	20.72%
5	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima	7,925,926,000	1,993,713,324	25.15%
	Total Angggaran	**21,495,552,000**	**3,791,621,585**	**17.64%**

Pada Sasaran Program 1 (Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan), realisasi mencapai 11,62%. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pengawasan telah mulai berjalan, namun masih terbatas pada tahap awal seperti perencanaan, koordinasi, dan sebagian pelaksanaan kegiatan lapangan. Diperlukan percepatan pelaksanaan pengawasan pada triwulan berikutnya agar kontribusi terhadap capaian kinerja semakin optimal.

Pada Sasaran Program 2 (Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik), realisasi baru mencapai 2,15%, merupakan yang terendah di antara seluruh sasaran program. Kondisi ini menunjukkan bahwa kegiatan yang melibatkan koordinasi lintas sektor sebagian besar belum

terlaksana pada Triwulan I dan kemungkinan direncanakan pada periode berikutnya. Hal ini memerlukan perhatian khusus agar pelaksanaan kegiatan dapat dipercepat.

Pada Sasaran Program 3 (Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu), realisasi sebesar 10,55% menunjukkan bahwa kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) telah mulai dilaksanakan, namun belum optimal. Kegiatan sosialisasi yang bersifat masif umumnya direncanakan pada triwulan berikutnya, sehingga realisasi pada awal tahun masih terbatas.

Pada Sasaran Program 4 (Meningkatnya efektivitas *regulatory assistance* dan kemandirian industri), realisasi mencapai 20,72%, yang menunjukkan progres pelaksanaan yang relatif lebih baik dibandingkan sasaran sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kegiatan pendampingan, konsultasi regulasi, dan fasilitasi industri telah mulai berjalan lebih intensif sejak awal tahun.

Sementara itu, Sasaran Program 5 (Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan serta Pelayanan Publik Unit Organisasi yang Prima) menunjukkan realisasi tertinggi sebesar 25,15%. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pendukung operasional, tata kelola, serta pelayanan publik berjalan lebih stabil dan berkelanjutan sejak awal tahun anggaran, sehingga kontribusinya terhadap realisasi anggaran relatif lebih tinggi.

Secara keseluruhan, pola realisasi anggaran per sasaran program menunjukkan bahwa kegiatan yang bersifat operasional dan layanan publik memiliki tingkat penyerapan yang lebih tinggi dibandingkan kegiatan yang bersifat substantif atau lintas sektor yang masih berada pada tahap persiapan. Oleh karena itu, diperlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada triwulan berikutnya, khususnya pada sasaran program dengan realisasi rendah, agar keseimbangan antara penyerapan anggaran dan pencapaian kinerja dapat terjaga secara optimal.

Efisiensi dan efektivitas atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja per sasaran.

Tabel 44 : Pengukuran Tingkat Efisiensi per Sasaran Kegiatan

No.	Sasaran Kegiatan	Input	Output	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	100,00	103,76	0,04
2	Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	n/a	n/a	n/a
3	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	n/a	n/a	n/a
4	Meningkatnya efektifitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	100,00	102,17	0,02
5	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	n/a	n/a	n/a

Analisis tingkat efisiensi per sasaran program pada Triwulan I Tahun 2026 menunjukkan bahwa sebagian sasaran program telah mampu menghasilkan output yang melampaui target dengan penggunaan input yang optimal, sementara beberapa sasaran lainnya belum dapat dihitung tingkat efisiensinya karena keterbatasan data capaian output pada periode ini.

Pada Sasaran Program 1 (Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan), tingkat efisiensi sebesar 0,04 menunjukkan bahwa dengan input sebesar 100%, output yang dihasilkan mencapai 103,76%. Hal ini mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan telah berjalan secara efisien, di mana sumber daya yang digunakan mampu menghasilkan kinerja yang melebihi target yang ditetapkan. Efisiensi ini mengindikasikan adanya optimalisasi pelaksanaan kegiatan, termasuk penerapan pengawasan berbasis risiko dan pemanfaatan sumber daya secara tepat sasaran.

Pada Sasaran Program 4 (Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri), tingkat efisiensi sebesar 0,02 dengan capaian output sebesar 102,17% juga menunjukkan kondisi yang efisien. Hal ini menandakan bahwa kegiatan pendampingan dan fasilitasi regulasi telah mampu memberikan hasil yang melampaui target dengan penggunaan input yang terkendali, mencerminkan efektivitas strategi pelaksanaan kegiatan serta responsivitas layanan kepada pelaku usaha.

Sementara itu, pada Sasaran Program 2, 3, dan 5, tingkat efisiensi belum dapat dihitung (n/a) karena belum tersedia data output yang memadai pada Triwulan I. Kondisi ini karena pelaksanaan kegiatan telah dilakukan namun pengukuran terhadap capaian kinerjanya (output) belum dilakukan pada triwulan ini (belum menghasilkan output yang dapat diukur secara kuantitatif). Oleh karena itu, penilaian efisiensi pada sasaran tersebut akan lebih relevan dilakukan pada triwulan berikutnya seiring dengan meningkatnya realisasi kegiatan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa pada sasaran program yang telah dapat diukur, Deputi II BPOM mampu menunjukkan tingkat efisiensi yang baik, dengan output yang melebihi target meskipun penggunaan input tetap terkendali. Ke depan, diperlukan konsistensi dalam pelaksanaan kegiatan serta percepatan realisasi pada sasaran yang belum terukur, agar tingkat efisiensi dapat dinilai secara menyeluruh dan mencerminkan kinerja organisasi secara utuh.

BAB IV

PENUTUP

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

BAB IV Penutup

A. Kesimpulan Umum Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis kinerja Deputi II BPOM pada Triwulan I Tahun 2026, secara umum kinerja organisasi menunjukkan hasil yang baik dan efektif. Hal ini tercermin dari Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 89,77 dengan predikat “Baik”, yang diperoleh melalui pengukuran terhadap 15 indikator kinerja dari 24 indikator kinerja. Mayoritas indikator menunjukkan capaian yang optimal, bahkan sebagian di antaranya melampaui target yang telah ditetapkan, khususnya pada aspek pengawasan produk, distribusi, serta pemberdayaan pelaku usaha.

Dari sisi pengelolaan anggaran, Deputi II BPOM pada Tahun 2026 memiliki pagu efektif sebesar Rp21.495.552.000, dengan realisasi hingga Triwulan I mencapai Rp3.791.621.585 atau sebesar 17,64%. Tingkat penyerapan ini menunjukkan bahwa pelaksanaan anggaran masih berada pada tahap awal, yang dipengaruhi oleh proses perencanaan teknis, pengadaan, serta penjadwalan kegiatan yang sebagian besar akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya.

Keberhasilan capaian kinerja yang telah diraih didukung oleh implementasi pengawasan berbasis risiko, penguatan koordinasi dengan UPT, serta pelaksanaan pembinaan yang terarah kepada pelaku usaha. Selain itu, efektivitas layanan *regulatory assistance* juga berkontribusi dalam meningkatkan kepatuhan industri dan kualitas produk yang beredar di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran masih relatif rendah pada awal tahun, pelaksanaan program tetap berjalan efektif dan memberikan dampak terhadap capaian kinerja.

Namun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target optimal, terutama pada aspek pengawasan sarana produksi dan pengawasan iklan, serta indikator yang belum terealisasi pada Triwulan I. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor waktu pelaksanaan kegiatan, dinamika kepatuhan pelaku usaha, serta kendala administratif dan teknis, termasuk keterlambatan pelaporan dan keterbatasan koordinasi lintas sektor.

Kendala dan Rekomendasi

Pelaksanaan kinerja Deputi II BPOM pada Triwulan I Tahun 2026 secara umum telah menunjukkan capaian yang baik, namun masih dihadapkan pada sejumlah kendala yang mempengaruhi optimalisasi pencapaian target indikator kinerja. Kendala tersebut terutama berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan pengawasan, koordinasi lintas sektor, serta tingkat kepatuhan pelaku usaha yang masih bervariasi. Dalam pengawasan produk, masih terdapat potensi duplikasi sampling antar UPT serta belum optimalnya pemanfaatan data pengawasan secara terintegrasi. Pada pengawasan sarana produksi dan distribusi, kendala utama terletak pada rendahnya kepatuhan pelaku usaha terhadap standar (CPOTB/CPKB), yang tidak sepenuhnya diimbangi dengan intensitas pembinaan. Sementara itu, pada pengawasan iklan, tingginya pelanggaran terutama di media digital, dominasi sampling pada kanal tertentu, serta keterlibatan *influencer* dan *reseller non-official* menjadi tantangan dalam memastikan pemenuhan terhadap ketentuan yang berlaku .

Selain itu, kendala juga ditemukan pada aspek tata kelola dan kinerja internal, seperti belum optimalnya pelaksanaan inspeksi pada beberapa indikator, keterbatasan anggaran

yang mempengaruhi pembinaan dan monitoring, serta masih adanya ketidaksesuaian dalam proses pelaporan dan pengukuran kinerja. Pada aspek lintas sektor, tindak lanjut rekomendasi pengawasan belum sepenuhnya optimal karena perbedaan kewenangan, keterbatasan waktu respons, serta faktor eksternal seperti hari libur nasional. Di sisi lain, pada aspek pemberdayaan masyarakat dan UMKM, masih terdapat keterbatasan pemahaman terhadap regulasi baru, termasuk implikasi perubahan kebijakan terhadap perizinan dan standar usaha .

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, telah dirumuskan sejumlah langkah strategis yang perlu segera dilaksanakan. Upaya yang direkomendasikan meliputi penguatan koordinasi lintas sektor melalui mekanisme komunikasi yang lebih responsif (seperti pemanfaatan sistem reminder dan kanal komunikasi langsung), peningkatan kualitas dan pemerataan sampling pengawasan, serta optimalisasi integrasi data pengawasan antar unit. Selain itu, diperlukan intensifikasi pembinaan kepada pelaku usaha melalui bimbingan teknis, forum koordinasi, dan edukasi berbasis risiko, guna meningkatkan kepatuhan terhadap standar produksi dan distribusi.

Dari sisi internal, diperlukan penguatan sistem monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, percepatan pelaksanaan kegiatan yang belum terealisasi, serta penyempurnaan sistem pelaporan dan pengukuran kinerja agar lebih akurat dan konsisten. Peningkatan kapasitas SDM, baik bagi petugas pengawasan maupun evaluator di UPT, juga menjadi langkah penting untuk memastikan keseragaman pemahaman dan kualitas pelaksanaan kegiatan. Selain itu, penguatan manajemen risiko melalui identifikasi dan pengelolaan risiko secara komprehensif perlu terus dilakukan sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan kinerja.

LAMPIRAN

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik

MATRIKS REKOMENDASI TRIWULAN I TAHUN 2026

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah Dikelola Sebagai	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
TRIWULAN I								
1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	Capaian kinerja telah tercapai kategori sangat baik namun adanya hal yang perlu diperhatikan 1. Ada kemungkinan sampling produk TIE non BKO yang sama,potensi tersampling oleh UPT yang lain pada produk yang sama (sebulan sekali) 2. Pembersihan pasar tidak hanya OBA BKO dalam satu surat. 3. Timeline pembersihan pasar SLA 3 bulan.	1. Tidak masuk pada aplikasi PW, namun dikirimkan surat pembersihan pasar. akan ada penjelasan produk tersebut tidak boleh disampling kembali 2. Listing akumulasi PW dalam surat pembersihan pasar kepada UPT 3. Kolaborasi antara Data PW (Waskamtu) dengan Sarana Distribusi	1. Tidak masuk pada aplikasi PW, namun dikirimkan surat pembersihan pasar. akan ada penjelasan produk tersebut tidak boleh disampling kembali 2. Listing akumulasi PW dalam surat pembersihan pasar kepada UPT 3. Kolaborasi antara Data PW (Waskamtu) dengan Sarana Distribusi	TW 2	T		
2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	Capaian kinerja tercapai dengan katgori tidak dapat disimpulkan karena Terdapat sekitar 943 sampel kasus dan online atau setara 40% sampel yang belum dilakukan sampling, yang diperkirakan 10% hingga 15% akan menyubang temuan produk SK yang TMS	Akan Dilakukan inwas tematik produk suplemen kesehatan impor pada sarana importir dan penjualan online pada bulan April	Akan Dilakukan inwas tematik produk suplemen kesehatan impor pada sarana importir dan penjualan online pada bulan April	April	T		
3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	Capaian kinerja pada kategori baik namun Potensi tidak tercapainya IKU disebabkan oleh evaluasi penandaan yang dilakukan oleh evaluator UPT belum sesuai dengan acuan/ketentuan yang berlaku, serta pelaksanaan sampling dan pengujian yang belum mengacu pada pedoman sampling yang ditetapkan	Perlu adanya bimbingan teknis serta monitoring dan evaluasi secara berkala setiap triwulan.	1. Bimbingan Teknis Sampling dan Pengujian serta Penandaan pada bulan April 2026 2. Monitoring dan Evaluasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan setiap triwulan 3. Forum Koordinasi Sampling dan Pengujian serta Penandaan pada TW 4	TW 2 - TW 4	Y	S-01/44	Peredaran kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan/atau dilarang.
4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan baru dilakukan pada TW III - IV, saat ini sedang dilakukan persiapan data dukung untuk pengukurannya.	Menyiapkan data dukung yang dibutuhkan pada saat pengukuran IKK	Melakukan identifikasi dan pengumpulan data dukung dalam rangka pengukuran IKK	TW III-IV	T		
5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Kategori capaian kinerja sd bulan maret yaitu cukup karena terdapatnya kendala sebagai berikut: 1. Peningkatan jumlah surat tindaklanjut pada bulan maret sebesar 198 surat lebih dari 100% dari bulan Februari 2. Terdapat semua permintaan takedown yang dikirimkan pada bulan februari belum di tl oleh linsek karena adanya libur lebaran 3. Pelanggaran banyak ditemukan pada iklan perseorangan yang membutuhkan tindaklanjut dari lintas sektor	1. Telah dilakukan kesepakatan dengan marketplace membahas mekanisme tindaklanjut berupa: WAG Sistem reminder melaui japri wa ataupun email 2. Perlu adanya penegasan kepada upt untuk melakukann sampling pada e-commerce official sehingga temuan tmk iklan dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait	1. Telah dilakukan kesepakatan dengan marketplace membahas mekanisme tindaklanjut berupa: WAG Sistem reminder melaui japri wa ataupun email 2. Perlu adanya penegasan kepada upt untuk melakukann sampling pada e-commerce official sehingga temuan tmk iklan dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait	TW 2	Y	S-02	Lintas sektor/ stakeholder sebagian tidak menindaklanjuti hasil pengawasan iklan dari Badan POM

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah Dikelola Sebagai	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Kategori capaian kinerja sd bulan maret yaitu cukup, kendala dalam pencapaian yaitu Ketidakpatuhan pelaku usaha dalam menerapkan CPOBAB	1. Forum pertemuan bersama pelaku usaha untuk membahas langkah intervensi yang akan dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan CPOBAB yang akan dilaksanakan bulan mei 2. membuat konsep edukasi kepada pelaku usaha agar pelaku usaha untuk konsisten dalam penerapan CPOBAB pada bulan april (sebelumnya akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PMPU)	1. Forum pertemuan bersama pelaku usaha untuk membahas langkah intervensi yang akan dilakukan dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha dalam penerapan CPOBAB yang akan dilaksanakan bulan mei 2. membuat konsep edukasi kepada pelaku usaha agar pelaku usaha untuk konsisten dalam penerapan CPOBAB pada bulan april (sebelumnya akan dilakukan koordinasi terlebih dahulu dengan PMPU)	TW 2	Y	SDM-01	Inspeksi Industri Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan sesuai dengan persyaratan CPOTB
7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Belum terdapat data hasil pengawasan yang diselesaikan UPT karena tidak ada perencanaan inspek yang dilakukan sd bulan Maret	Monitoring pelaksanaan pengawasan oleh upt sesuai renlak	Monitoring pelaksanaan pengawasan oleh upt sesuai renlak	TW 2	T		
8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Tidak tercapainya IKU fasilitas produksi kosmetik yang memenuhi ketentuan karena penajaman analisis risiko oleh UPT dalam melakukan pemeriksaan tidak diimbangi dengan intensifikasi pembinaan kepada pelaku usaha produksi kosmetik	Perlu adanya peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan oleh UPT setempat	Koordinasi secara berkala dengan UPT terkait upaya pembinaan terhadap sarana produksi kosmetik	TW 2 - TW 4	Y	S-03/44	Masih terdapat sarana produksi kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan
9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Kategori capaian kinerja sd bulan maret yaitu sangat baik dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan	Dilakukan inwas pada depot jamu di bulan juni	Dilakukan inwas pada depot jamu di bulan juni	Juni	T		
10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Kategori capaian kinerja sd bulan maret yaitu sangat baik dan tidak terdapat kendala dalam pelaksanaan	Monitoring pelaksanaan pengawasan oleh upt sesuai renlak	Monitoring pelaksanaan pengawasan oleh upt sesuai renlak	TW 2	T		
11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Tidak tercapainya IKU fasilitas distribusi yang tidak memenuhi ketentuan karena penajaman analisis risiko oleh UPT dalam melakukan pemeriksaan tidak diimbangi dengan intensifikasi pembinaan kepada pelaku usaha distribusi kosmetik	Perlu adanya peningkatan pembinaan terhadap pelaku usaha tidak memenuhi ketentuan oleh UPT setempat	Koordinasi secara berkala dengan UPT terkait upaya pembinaan terhadap sarana distribusi kosmetik	TW 2 - TW 4	Y	S-04/44	Masih terdapat sarana distribusi kosmetik yang Tidak Memenuhi Ketentuan
12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	Dalam pendistribusian pemilihan sampling beberapa UPT telah mendominasi pelaporan e-commerce di bulan Februari – Maret 2026	Dalam pendistribusian pemilihan sampling beberapa UPT telah mendominasi pelaporan e-commerce di bulan Februari – Maret 2026, harapannya dapat menyasar untuk media lainnya untuk bulan selanjutnya	Dalam pendistribusian pemilihan sampling beberapa UPT telah mendominasi pelaporan e-commerce di bulan Februari – Maret 2026, harapannya dapat menyasar untuk media lainnya untuk bulan selanjutnya	TW 2	Y	O-07	Tingginya jumlah iklan OTSK tidak memenuhi ketentuan dengan klaim berlebihan dan menyesatkan serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah Dikelola Sebagai	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	Dalam pendistribusian pemilihan sampling beberapa UPT telah mendominasi pelaporan e-commerce di bulan Februari – Maret 2026	Dalam pendistribusian pemilihan sampling beberapa UPT telah mendominasi pelaporan e-commerce di bulan Februari – Maret 2026, harapannya dapat menyasar untuk media lainnya untuk bulan selanjutnya	Dalam pendistribusian pemilihan sampling beberapa UPT telah mendominasi pelaporan e-commerce di bulan Februari – Maret 2026, harapannya dapat menyasar untuk media lainnya untuk bulan selanjutnya	TW 2	Y	O-07	Tingginya jumlah iklan OTSK tidak memenuhi ketentuan dengan klaim berlebihan dan menyesatkan serta tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	Maraknya penjualan kosmetik secara online oleh reseller non-official dan influencer yang cenderung tidak mengetahui ketentuan periklanan yang berlaku sehingga meningkatkan iklan kosmetik yang tidak memenuhi ketentuan	Perlu dilakukan tindak lanjut hasil pengawasan iklan kosmetik di marketplace secara lebih intensif	Berkoordinasi dengan penyedia marketplace dalam menindaklanjuti hasil pengawasan iklan yang tidak memenuhi ketentuan di marketplace	TW 2 - TW 4	Y	OP-08/44	Masih terdapat iklan Kosmetik tidak memenuhi ketentuan di media online
15	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	Dalam proses penyusunan Juknis dan pemetaan lokus	Proses penyusunan Juknis dan pemetaan lokus	Advokasi dan kick off pelaksanaan program sadar jamu aman	TW 2	Y	S-05/45	Komitmen kabupaten/kota hanya bersifat administratif, tidak diimplementasikan secara nyata
16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	Rendahnya literasi masyarakat dalam memilih OBA, SK dan Kos yang aman	- Melakukan KIE di berbagai media -Melakukan monitring dan evaluasi pelaksanaan KIE	1. KIE di berbagai media 2. Pembentukan kader keamanan OBA, SK, Kos 3. Penyusunan modul KIE OBA, SK, Kos 4. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan KIE	TW 2 - TW 4	Y	SDM-06/45	Masih terdapat demand masyarakat terhadap OBA, SK, Kos tidak memenuhi ketentuan
17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	Kategori capaian kinerja sd bulan maret yaitu sangat baik	Melanjutkan intensifikasi pendampingan penyusunan protokol dan evaluasi hasil uji praklinik/klinik dan menyelenggarakan webinar uji praklinik/klinik	Menyelenggarakan kegiatan pendampingan/webinar/bimtek penyusunan protokol dan evaluasi hasil uji praklinik/klinik	TW II - TW IV	Y	S-07/42	Perbedaan persepsi antara stake holder dengan Badan POM saat pendampingan penelitian produk hilirisasi
18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	Dengan terbitnya PP 28 tahun 2025, kategori risiko OBA dan Kosmetik menjadi tinggi, sehingga terkendala dalam pemenuhan persyaratan di OSS	Perlu adanya pemahaman pengetahuan bagi pelaku UMKM OBA dan Kosmetik terkait PP 28 tahun 2025 khususnya KBLI 21022 (OBA) dan KBLI 20232 (kosmetik)	- Koordinasi dengan BPKM, PTSP, Kemenperin dan pelaku UMKM OBA Kos - Sharing knowledge terkait PP 28 tahun 2025	TW 2 - TW 4	Y	OP-08/45	UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik belum dapat memenuhi persyaratan CPOTB/CPKB/izin edar
19	Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	- Masih kurangnya pemahaman petugas UPT BPOM dalam tahapan proses sertifikasi - Masih kurangnya monitoring dan evaluasi oleh Ditwas - Efisiensi anggaran menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan program peningkatan maturitas, terutama anggaran di UPT BPOM	- perlu diadakan pelatihan internal kepada UPT BPOM dan monev secara berkala - koordinasi terkait anggaran audit oleh petugas UPT BPOM yang bertugas sebagai PIC program akselerasi	- pelatihan internal kepada UPT BPOM dan monev pelaksanaan program maturitas secara berkala - sharing anggaran antara petugas pusat dan daerah	TW 2 - TW 4	Y	S-09/44	Pelaksanaan tidak sesuai dengan timeline yang direncanakan
20	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	Pengukuran akan dilaksanakan pada TW IV	menyiapkan data dukung dalam rangka pengukuran IPP	Melakukan identifikasi dan pengumpulan data dukung dalam rangka pengukuran IPP	TW II - TW IV	T	-	-
21	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	TMS penilaian pra evaluasi (seleksi administrasi) Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Tahun 2026, untuk poin TLHP BPK (SS/SS Parsial)	Melakukan tindak lanjut TLHP BPK sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Melakukan tindak lanjut TLHP BPK sesuai rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	TW 2 - TW 4			

No	Indikator Kinerja Sasaran Program	Kendala/Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah Dikelola Sebagai	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
22	Nlai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Penurunan Nilai SAKIP	Melakukan tindak Lanjut perbaikan atas hasil penilaian SAKIP tahun sebelumnya	1. Melakukan Monev Kinerja secara berkala 2. Memastikan kembali kertas kerja penetapan target dengan menyajikan penjelasan perubahan/justifikasi, hasil analisa dan perhitungan yang logis sebagai dasar penetapan target untuk semua indicator. 3. Menyusun SOP pengumpulan data kinerja untuk masing-masing unit kerja Eselon II 4. Memastikan dan menyempurnakan Lakip Tahunan, Lapkin interim, dan Lep Evaluasi Internal untuk TW 3 2025 sd tahun berjalan sesuai dengan rekomendasi evaluator dan pedoman sakip terbaru. 5. Memastikan dan melakukan update pengisian data pada aplikasi simetris untuk tahun 2025 sd tahun berjalan dengan melengkapi informasi terkait kendala/ hambatan dan Rekomendasi/Rencana Tindak Lanjut yang akan dan telah dilaksanakan secara memadai. 6. Melakukan upload publikasi dokumen-dokumen perencanaan seperti PK, RAPK, dan dokumen lainnya untuk tingkat Eselon 1 dan	TW 2 - TW 4		Y	Nilai SAKIP tidak sesuai target
23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Tidak ada kendala yang cukup berarti, penilaian IKPA pada TW I (sebagai bagian dari penilaian NKA di Akhir tahun) telah mendapatkan nilai maksimal, kecuali untuk komponen Pelaporan Capaian Output, karena proses input target output belum dibuka oleh Kemenkeu.	Melakukan input target kinerja setelah menu pelaporan dibuka	Menyusun rencana pencapaian target kinerja untuk diinput pada Aplikasi SAKTI	TW III - IV	T	-	
24	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	Pembahasan daftar risiko yang ada di Deputi II	Pengisian daftar risiko di aplikasi SAPA APIP sebelum tanggal 20 Maret 2026	Pembahasan daftar risiko yang ada di Deputi II secara rutin	TW 2	Y	SDM-05/SPI	Penyusunan daftar risiko tingkat deputi belum komprehensif

MATRIKS STATUS TINDAK LANJUT REKOMENDASI TRIWULAN SEBELUMYA

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rencana Tindak lanjut TW sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
1	Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
2	Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
3	Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
4	Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
5	Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
6	Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
7	Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
8	Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
9	Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
10	Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
11	Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
12	Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
13	Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
14	Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
15	Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
16	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
17	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
18	Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
19	Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
20	Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
21	Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
22	Nlai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW sebelumnya	Rencana Tindak lanjut TW sebelumnya	Status	Progres TL Rekomendasi	Timeline	Apakah sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
23	Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			
24	Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a			

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: MOHAMAD KASHURI
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Februari 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI
MOHAMAD KASHURI	**TARUNA IKRAR**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu	66 Persen
		02 - Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu	75 Persen
		03 - Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu	65 Persen
		04 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	97.75 Indeks
		05 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83.75 Persen
		06 - Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87 Persen
		07 - Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86.6 Persen
		08 - Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82 Persen
		09 - Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66 Persen
		10 - Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93 Persen
		11 - Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	74 Persen
		12 - Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67 Persen
		13 - Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83 Persen

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET
		14 - Persentase iklan Kosmetik yang memenuhi ketentuan	61 Persen
2.	02 - Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	01 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman	0.9 Persen
3.	03 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu	88.9 Indeks
4.	04 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91 Persen
		02 - Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos	64.5 Persen
		03 - Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas	34 Persen
5.	07 - Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan	4.91 Indeks
		02 - Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	90.28 Nilai
		03 - NIai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	82.24 Nilai
		04 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	5 Nilai
		05 - Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos	2.99 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 25,764,547,000 (Dua Puluh Lima Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	1,110,390,000
2.	DR.4119 - Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	4,303,673,000
3.	DR.4121 - Pengawasan Kosmetik	4,323,218,000
4.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	7,030,866,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
5.	DR.4128 - Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	6,652,870,000
6.	DR.6385 - Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	2,343,530,000

Jakarta, 26 Februari 2026

Pihak Pertama
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI

Pihak Kedua
Kepala Badan Pengawas
Obat dan Makanan RI

TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase Obat bahan alam yang aman dan bermutu		66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	1,641,676,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	054 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	A - Evaluasi Dokumen dan Data Uji Praklinik dan Uji Klinik Obat Bahan Alam/Suplemen Kesehatan	275,900,000	275,900,000
2.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	051 - Registrasi Obat Bahan Alam	A - Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Obat Bahan Alam	92,150,000	92,150,000
3.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	051 - Registrasi Obat Bahan Alam	B - Rapat Evaluasi Registrasi produk dan iklan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	307,350,000	307,350,000
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	B - Forum Koordinasi Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan bagi Pelaku Usaha	62,615,000	15,653,750
5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	A - Penelusuran Kasus terhadap pengawasan produk yang tidak memenuhi persyaratan Keamanan dan Mutu	132,125,000	66,062,500
6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	B - Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu	112,965,000	56,482,500
7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	G - Penguatan Pengawasan dan Penelusuran Pelanggaran Peredaran OBA, OK, dan SK di Media Online	87,530,000	43,765,000
8.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	A - Penguatan Kemandirian UPT melalui Monitoring dan Supervisi Pengawasan OBA, OK dan SK	172,000,000	86,000,000
9.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	B - Pelatihan Inspektur Topik Khusus	44,820,000	22,410,000
10.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan	D - Penguatan Kapasitas Petugas UPT Badan POM	56,986,000	28,493,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	Dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan OBA, OK dan SK		
11.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	C - Peningkatan Kompetensi dengan Pelatihan Eksternal	119,450,000	59,725,000
12.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS	A - Penguatan Kolaborasi Antar Sektor untuk Peningkatan Kinerja di bidang Registrasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	354,275,000	354,275,000
13.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	A - Peningkatan Kapasitas Petugas UPT dan Pelaku Usaha dalam menjamin Keamanan dan Mutu Produk	466,820,000	233,410,000

02 - Persentase Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu		75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	1,303,751,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	D - Penguatan Kapasitas Petugas UPT Badan POM Dalam Kesesuaian Evaluasi Hasil Pengawasan Iklan dan Penandaan OBA, OK dan SK	56,986,000	28,493,000
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	B - Pelatihan Inspektur Topik Khusus	44,820,000	22,410,000
3.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	052 - Registrasi Suplemen Kesehatan	B - Clustering Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan	21,000,000	21,000,000
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	A - Penguatan Kemandirian UPT melalui Monitoring dan Supervisi Pengawasan OBA, OK dan SK	172,000,000	86,000,000
6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	B - Forum Koordinasi Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan bagi Pelaku Usaha	62,615,000	15,653,750
7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	A - Penelusuran Kasus terhadap pengawasan produk yang tidak memenuhi persyaratan Keamanan dan Mutu	132,125,000	66,062,500
8.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	B - Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Keamanan dan Mutu	112,965,000	56,482,500
9.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan	054 - Penilaian Uji Praklinik / Klinik Obat	B - Penilaian Pelaksanaan Uji Praklinik dan Klinik Obat Bahan	98,000,000	98,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Alam dan Suplemen		
10.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	052 - Registrasi Suplemen Kesehatan	A - Intensifikasi dan Desk Registrasi Permasalahan Registrasi Produk dan Iklan Dalam Rangka Percepatan Izin Edar Suplemen Kesehatan	108,300,000	108,300,000
11.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS	C - Honor Pengelola Keuangan	17,280,000	17,280,000
12.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	055 - Monitoring dan Evaluasi Kinerja Registrasi OT, SK dan KOS	B - Pengayaan Kompetensi SDM Bidang Registrasi OT, SK dan Kosmetik	447,170,000	447,170,000
13.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	G - Penguatan Pengawasan dan Penelusuran Pelanggaran Peredaran OBA, OK, dan SK di Media Online	87,530,000	43,765,000
14.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	A - Peningkatan Kapasitas Petugas UPT dan Pelaku Usaha dalam menjamin Keamanan dan Mutu Produk	466,820,000	233,410,000
15.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	C - Peningkatan Kompetensi dengan Pelatihan Eksternal	119,450,000	59,725,000

03 - Persentase Kosmetik yang aman dan bermutu		65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	1,184,250,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik	A - Intensifikasi dan Desk Data Permohonan Notifikasi Kosmetika	217,400,000	217,400,000
3.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik	B - Rapat Evaluasi Aspek Keamanan dan Klaim Kosmetika	36,600,000	36,600,000
4.	DR.4128.PCA.001 - Keputusan Registrasi Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan, serta Notifikasi Kosmetika yang Diselesaikan Sesuai Ketentuan	053 - Registrasi Notifikasi Kosmetik	C - Clustering Notifikasi Kosmetik	12,600,000	12,600,000
5.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	B - Pengawalan Perkembangan Industri Kosmetik menuju Mutu Produk yang Berdaya Saing Global	97,630,000	97,630,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	C - Dukungan Terhadap Produksi dan Pengembangan Natural Kosmetik	30,510,000	30,510,000
7.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	D - Intensifikasi Penelusuran Bahan Berbahaya/ Dilarang dalam Kosmetik	175,000,000	175,000,000
8.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	E - Public Awareness Bahaya Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya / Dilarang	50,000,000	50,000,000
9.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	F - Pelaksanaan monitoring dan evaluasi efek samping kosmetik	75,000,000	75,000,000
10.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	055 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Pengawasan Kosmetik oleh UPT BPOM	A - Pembinaan UPT dalam rangka Pengawasan Kosmetik	75,000,000	75,000,000
11.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik	A - Intensifikasi Pengawasan Post Market Penandaan Kosmetik	300,000,000	300,000,000
12.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan keamanan dan mutu Kosmetik	A - Forum Sampling Kosmetik untuk Pusat dan Daerah	114,510,000	114,510,000

		04 - Indeks Kualitas Kebijakan Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik											97.75	2,606,045,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	D - Peningkatan Literasi Regulasi	384,800,000	384,800,000
3.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	A - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Obat Bahan Alam	500,000,000	500,000,000
4.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	B - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	450,000,000	450,000,000
5.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	051 - Penyusunan dan Pembahasan Standar Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	C - Penyusunan dan Pembahasan Regulasi di bidang Kosmetik	450,000,000	450,000,000
6.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	054 - Perencanaan/Monitoring/Evaluasi	A - Brainstorming /	11,200,000	11,200,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	penyusunan standar dibidang OT, SK dan Kos		
7.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	054 - Perencanaan/Monitoring/Evaluasi pengelolaan dan kinerja di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	B - Peningkatan Kompetensi Pegawai	217,200,000	217,200,000
8.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	B - Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	332,400,000	332,400,000
9.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	056 - Monitoring dan evaluasi kinerja standardisasi OT, Suplemen Kesehatan, Kosmetik	A - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	25,680,000	25,680,000
10.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	C - Partisipasi pada sidang ke 17 IRCH	80,000,000	80,000,000
11.	DR.4129.AFA.001 - Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Disusun	055 - Sosialisasi/Konsultasi/Koordinasi untuk penyusunan di bidang OT, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	A - Sosialisasi Regulasi di bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	154,765,000	154,765,000

05 - Persentase rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, Obat Kuasi dan Kosmetik yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	83.75	245,495,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	D - Perkuatan Pengawasan Iklan Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan Bersama Lintas Sektor	103,522,000	103,522,000
3.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	054 - Koordinasi Lintas Sektor Terkait Perkuatan Pengawasan Kosmetik	A - Rapat Pembahasan Aktual Direktorat pengawasan Kosmetik	77,173,000	77,173,000
4.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	054 - Koordinasi Lintas Sektor Terkait Perkuatan Pengawasan Kosmetik	B - Pemantapan Kerja Pengawasan Kosmetik serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	64,800,000	64,800,000

06 - Persentase sarana produksi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	159,271,250

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	E - Optimalisasi Fungsi Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi sesuai Rekomendasi Supra System	58,065,000	14,516,250
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	B - Pertemuan Koordinasi Inspektur dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	36,300,000	18,150,000
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	C - Komunikasi Hasil Pengawasan OBA dan SK kepada Asosiasi / Pelaku Usaha	46,800,000	11,700,000
5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	A - Integrasi dan Penguatan Sistem Mutu CPOTB untuk Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi yang Efektif dan Efisien	71,230,000	17,807,500
6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	340,510,000	85,127,500
7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	D - Asistensi Penuntasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi OBA dan SK UPT Badan POM	47,880,000	11,970,000

07 - Persentase sarana produksi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	86.6	159,271,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	340,510,000	85,127,500
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	D - Asistensi Penuntasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi OBA dan SK UPT Badan POM	47,880,000	11,970,000
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	E - Optimalisasi Fungsi Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi sesuai Rekomendasi Supra System	58,065,000	14,516,250
5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	B - Pertemuan Koordinasi Inspektur dalam Rangka Memaksimalkan Kinerja Pengawasan	36,300,000	18,150,000
6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan	A - Integrasi dan Penguatan Sistem Mutu CPOTB untuk Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen	71,230,000	17,807,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	efektifitas pengawasan OBA OK SK	Kesehatan dan Obat Kuasi yang Efektif dan Efisien		
7.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	C - Komunikasi Hasil Pengawasan OBA dan SK kepada Asosiasi / Pelaku Usaha	46,800,000	11,700,000

08 - Persentase sarana produksi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	82	1,081,805,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	A - Penilaian DIP	341,280,000	341,280,000
2.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	B - Intensifikasi Penilaian DIP dan Tindak Lanjut Hasil Penilaian DIP	94,990,000	94,990,000
4.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	C - Bimtek dan Coaching dalam rangka penyusunan DIP	93,804,000	93,804,000
5.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	E - Forum Komunikasi Fasilitator Registrasi dalam Rangka Perkuatan Pendampingan UMKM Kosmetik	176,900,000	176,900,000
6.	DR.4128.BIA.001 - Keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) kosmetik yang diselesaikan sesuai standar	051 - Penilaian DIP	D - Forum Komunikasi Terkait Notifikasi Kosmetika	56,100,000	56,100,000
7.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	053 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan sarana produksi dan distribusi kosmetik	A - Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat	637,463,000	318,731,500

09 - Persentase fasilitas distribusi Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	66	141,121,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	E - Optimalisasi Fungsi Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi sesuai Rekomendasi Supra System	58,065,000	14,516,250
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi	D - Asistensi Penuntasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana	47,880,000	11,970,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	Produksi dan Distribusi OBA dan SK UPT Badan POM		
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	340,510,000	85,127,500
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	C - Komunikasi Hasil Pengawasan OBA dan SK kepada Asosiasi / Pelaku Usaha	46,800,000	11,700,000
6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	A - Integrasi dan Penguatan Sistem Mutu CPOTB untuk Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi yang Efektif dan Efisien	71,230,000	17,807,500

10 - Persentase fasilitas distribusi Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	141,121,250

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	D - Asistensi Penuntasan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi OBA dan SK UPT Badan POM	47,880,000	11,970,000
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	A - Integrasi dan Penguatan Sistem Mutu CPOTB untuk Pengawasan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Obat Kuasi yang Efektif dan Efisien	71,230,000	17,807,500
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	053 - Peningkatan Koordinasi dalam penguatan dan efektifitas pengawasan OBA OK SK	C - Komunikasi Hasil Pengawasan OBA dan SK kepada Asosiasi / Pelaku Usaha	46,800,000	11,700,000
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	E - Optimalisasi Fungsi Pengawasan Sarana Produksi dan Distribusi sesuai Rekomendasi Supra System	58,065,000	14,516,250
6.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	C - Inspeksi Komprehensif dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Berbasis Risiko	340,510,000	85,127,500

11 - Persentase fasilitas distribusi Kosmetik yang memenuhi ketentuan	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	318,731,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika	053 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan	A - Intensifikasi Pemeriksaan dan Penelusuran Sarana Produksi, Distribusi dan Importir yang Berdasarkan Hasil Pengawasan Diduga Memproduksi dan	637,463,000	318,731,500

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	yang diselesaikan Tepat Waktu	sarana produksi dan distribusi kosmetik	Mengedarkan Kosmetika Ilegal dan Tidak Memenuhi Syarat		

12 - Persentase iklan Obat Bahan Alam yang memenuhi ketentuan	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	98,823,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	C - Peningkatan Literasi Masyarakat terkait Informasi dan Promosi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	53,459,000	26,729,500
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	E - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawasan Daring bagi Petugas Badan POM	42,470,000	21,235,000
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	F - Penelusuran Temuan Pelanggaran Produk dan Promosi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	70,411,000	35,205,500
5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	B - Forum Koordinasi Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan bagi Pelaku Usaha	62,615,000	15,653,750

13 - Persentase iklan Suplemen Kesehatan yang memenuhi ketentuan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	98,823,750

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	B - Forum Koordinasi Iklan dan Penandaan Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan bagi Pelaku Usaha	62,615,000	15,653,750
3.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pengawasan Penerapan Regulasi Terkini pada Pelaku Usaha OBA, OK, SK	F - Penelusuran Temuan Pelanggaran Produk dan Promosi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	70,411,000	35,205,500
4.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	054 - Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan Hasil Pengawasan OBA, SK , OK oleh Petugas UPT Badan POM	E - Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Pengawasan Daring bagi Petugas Badan POM	42,470,000	21,235,000
5.	DR.4119.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini Terkait OBA OK SK Kepada Pelaku Usaha dan Masyarakat	C - Peningkatan Literasi Masyarakat terkait Informasi dan Promosi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan	53,459,000	26,729,500

14 - Persentase iklan Kosmetik yang	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	61	181,920,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		memenuhi ketentuan													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
2.	DR.4121.BIA.001 - Keputusan Hasil Pengawasan Kosmetika yang diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan Koordinasi dalam rangka tindak lanjut pengawasan informasi dan promosi kosmetik	B - Intensifikasi Pengawasan Iklan Kosmetik di Era Digital	181,920,000	181,920,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
2.	02 - Meningkatnya peran aktif lintas sektor dalam pengawasan OBA, SK, Kos	01 - Persentase kabupaten/kota yang melaksanakan Program Sadar Jamu Aman										0.5	0.5	0.9	286,544,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.6385.FBA.002 - Kabupaten / kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	051 - Pelaksanaan Pemberdayaan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha	A - Indonesia Sadar Jamu Aman	286,544,000	286,544,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
3.	03 - Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	01 - Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang aman dan bermutu												88.9	2,181,068,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	-	-	A - Sosialisasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	0	0
2.	DR.6385.BDC.002 - Layanan Sosialisasi	051 - Pelaksanaan Sosialisasi	A - Sosialisasi di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	25,000,000	25,000,000
3.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos	C - Pemberian Informasi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman kepada Masyarakat	237,134,000	237,134,000
4.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos	D - Sinergi BPOM dan Kader Mitra Lintas Sektor dalam Penguatan Pengawasan Obat dan Makanan	107,968,000	107,968,000
5.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos	E - Koordinasi Pemberdayaan OBA, SK dan Kos serta Peningkatan Kerjasama Lintas Sektor	165,904,000	165,904,000
6.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	B - Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Sertifikasi dan Perolehan Nomor Izin Edar UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik Melalui Penguatan Peran Koperasi Desa Merah Putih	317,032,000	158,516,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
7.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos	B - Pembentukan Fasilitator Pemberdayaan Masyarakat Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Aman	226,485,000	226,485,000
8.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	A - Penguatan dan Perluasan Program Pendampingan UMKM OBA dan UMKM Kosmetik melalui Fasilitator	249,490,000	124,745,000
9.	DR.6385.BDC.001 - Fasilitator pemberdayaan masyarakat yang ditingkatkan peran sertanya dalam pengawasan OBA, SK, dan Kos	051 - Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat terkait OBA, SK dan Kos	A - Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	24,926,000	24,926,000
10.	DR.3165.BDC.001 - Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	053 - Komunikasi, Informasi dan Edukasi oleh Deputi II	A - KIE oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	1,110,390,000	1,110,390,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
4.	04 - Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	01 - Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	91	2,406,614,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4128.BDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	052 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	A - Bimbingan Teknis Petugas Registrasi (Regulatory Officer) dan Coaching Clinic Notifikasi Kosmetik kepada pelaku usaha termasuk UMKM, dalam rangka pemenuhan persyaratan notifikasi kosmetik	73,780,000	73,780,000
2.	DR.4128.BDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	052 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	B - Bimbingan Teknis Petugas Registrasi (Regulatory Officer) dan Coaching Clinic Registrasi OBA, OK ,SK kepada pelaku usaha termasuk UMKM dalam rangka Pemenuhan Dossier	198,280,000	198,280,000
3.	DR.4128.BDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	052 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	D - Pelayanan Prima Registrasi OBA, SK dan Kosmetik di Daerah dalam Rangka Percepatan Izin Edar	450,940,000	450,940,000
4.	DR.4128.BDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	052 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	E - OSS Jemput Bola dalam rangka percepatan penyelesaian registrasi OT, SK dan Kosmetik di Daerah	1,095,840,000	1,095,840,000
5.	DR.4128.BDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	052 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	F - Giat Registrasi Serentak Nasional dan Daerah (GERAKSENADA)	343,774,000	343,774,000
6.	DR.4128.BDB.001 - Pelaku usaha dan peneliti yang diberikan pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik	052 - Penyelenggaraan bimbingan teknis dan pendampingan pelaku usaha di bidang registrasi OT, SK dan KOS	C - Pendampingan dan Optimalisasi Uji Praklinik atau Uji Klinik dalam Mendukung Hilirisasi Obat Bahan Alam Indonesia	244,000,000	244,000,000

		02 - Persentase			4	12	20	30	38	45	50	55	60	64.5	994,776,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi OBA dan Kos													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	D - Perluasan Pemberdayaan Pelaku Usaha dengan Melibatkan Lintas Sektor	318,200,000	318,200,000
2.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	C - Expo OBA dan Kosmetik	288,995,000	288,995,000
3.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	A - Penguatan dan Perluasan Program Pendampingan UMKM OBA dan UMKM Kosmetik melalui Fasilitator	249,490,000	124,745,000
4.	DR.6385.QDC.001 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA, SK dan Kos yang sesuai standar	051 - Fasilitator pemberdayaan pelaku UMKM OBA dan SK yang sesuai standar	B - Pendampingan Pemenuhan Persyaratan Sertifikasi dan Perolehan Nomor Izin Edar UMKM Obat Bahan Alam dan Kosmetik Melalui Penguatan Peran Koperasi Desa Merah Putih	317,032,000	158,516,000
6.	DR.4119.BDG.002 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	052 - Peningkatan Pemahaman Regulasi Terkini dalam rangka kemandirian bahan baku	A - Supervisi dalam penyelenggaraan NUANSA di UPT pada wilayahnya	94,600,000	94,600,000
7.	DR.4119.BDG.002 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dalam Rangka Peningkatan Kapasitas UMKM OBA yang Diselesaikan	051 - Akselerasi peningkatan kapasitas UMK melalui program naik kelas umk OBA Indonesia (NUANSA)	A - Intervensi Program NUANSA dalam rangka menjamin keamanan dan mutu produk OBA	9,720,000	9,720,000

		03 - Persentase Industri Obat Bahan alam dan Kosmetik yang Mencapai Tingkat Maturitas												34	1,338,580,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4121.QDI.001 - Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	051 - Pelaksanaan Program Maturitas Industri Kosmetik Terhadap Pemenuhan Aspek CPKB	A - Identifikasi dan Penentuan Intervensi Peserta Akselerasi Maturitas	343,453,000	343,453,000
2.	DR.4119.QDI.001 - Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB	052 - Penyempurnaan prosedur penilaian maturitas industri OBA	A - Penyempurnaan Database penerapan farmakovigilans OBA, OK dan SK Rangka Penilaian Maturitas	68,400,000	68,400,000
3.	DR.4119.QDI.001 - Industri OBA yang diintervensi dalam peningkatan maturitas CPOTB	051 - Pengawasan penerapan regulasi maturitas industri OBA	A - Penilaian Tingkat Maturitas Industri Obat Bahan Alam sesuai Tools Maturitas yang ditetapkan	171,600,000	171,600,000
4.	DR.4121.QDI.001 - Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	051 - Pelaksanaan Program Maturitas Industri Kosmetik Terhadap Pemenuhan Aspek CPKB	D - Fasilitasi Pemenuhan CAPA Hasil Sertifikasi dalam rangka Akselerasi Maturitas	100,717,000	100,717,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
6.	DR.4121.QDI.001 - Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	051 - Pelaksanaan Program Maturitas Industri Kosmetik Terhadap Pemenuhan Aspek CPKB	B - Pelaksanaan Sertifikasi CPKB dalam rangka Akselerasi Maturitas	288,842,000	288,842,000
7.	DR.4121.QDI.001 - Industri Kosmetik yang Mengikuti Program maturitas yg Dapat Menerapkan CPKB secara penuh	051 - Pelaksanaan Program Maturitas Industri Kosmetik Terhadap Pemenuhan Aspek CPKB	C - Fasilitasi Pemenuhan CAPA Hasil Sertifikasi dalam rangka Akselerasi Maturitas	365,568,000	365,568,000

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	ANGGARAN
5.	07 - Terwujudnya Tata kelola Pemerintahan serta pelayanan publik Unit Organisasi yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik di Bidang Pengawasan Obat Bahan Alam, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan												4.91	5,259,381,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik	C - Medical Check UP Direktorat Pengawasan Kosmetik	188,100,000	188,100,000
2.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik	B - Penguatan Kepatuhan dan Pengawasan Pemasukan Kosmetik di Kawasan Strategis	245,000,000	245,000,000
3.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik	D - Evaluasi Pelayanan Publik Berkelanjutan untuk Mendorong Inovasi dan Pelayanan Prima	111,900,000	111,900,000
4.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	A - Peningkatan Kualitas Layanan Publik	596,750,000	596,750,000
5.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	C - Pengembangan Aplikasi Pelayanan Publik	121,627,000	121,627,000
6.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	D - Development Dialogue dalam rangka Peningkatan kinerja Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	351,780,000	351,780,000
7.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	B - Publikasi Layanan Publik	80,000,000	80,000,000
8.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	E - Pemetaan dan Penyiapan Master Data dalam rangka pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) pada Registrasi produk dan iklan Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	222,000,000	222,000,000
9.	DR.4128.BAH.001 - Layanan Publik Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang Prima	051 - Koordinasi Pengelolaan Kinerja Registrasi	F - Forum Komunikasi Fasilitator Registrasi dalam Rangka Penguatan Sinergi Pelayanan Publik bagi UMKM Start Up Obat TradisionaldanObatKuasi	123,000,000	123,000,000
10.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan	051 - Peningkatan	A - Bimbingan Teknis kepada Petugas	11,450,000	11,450,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat	pelayanan Publik Sertifikasi		
11.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat	B - Upgrading Pemahaman Penerapan CPOTB pada Personil Kunci Industri di Bidang Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, dan Suplemen Kesehatan	32,225,000	32,225,000
12.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	051 - Peningkatan pemahaman regulasi terkini terkait penilaian sarana dan ekspor/impor kepada pelaku usaha dan masyarakat	C - Jamu Export Assistance dan Perluasan Akses Pasar Jamu Untuk Percepatan Ekspor Jamu	126,200,000	126,200,000
13.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK	B - Intensifikasi Pengawasan Importir OBA dan SK melalui Pendekatan Desain Baru Pengawasan	47,505,000	47,505,000
14.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	A - Percepatan Pelayanan Publik Sertifikasi Sarana Produksi dan Distribusi Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen kesehatan	68,040,000	68,040,000
15.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	B - Peningkatan Peran UPT dalam rangka Intensifikasi Pengawasan Pemasukan OT SK melalui mekanisme SAS Barang Kiriman Peruntukan Pribadi	150,134,000	150,134,000
16.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	C - Bimbingan teknis Bagi Petugas Dalam Rangka Peningkatan pelayanan publik SKI/SKE/SAS OT dan SK	44,500,000	44,500,000
17.	DR.6385.BAH.001 - Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima	051 - Layanan Publik Dit PMPU OTSKK yang Prima	B - Workshop Pelayanan Prima	15,078,000	15,078,000
18.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	B - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat Suplemen Kesehatan	108,600,000	108,600,000
19.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	D - Peningkatan Kualitas Layanan Publik	198,545,000	198,545,000
20.	DR.6385.BAH.001 - Layanan Publik Dit. PMPU OT, SK, dan Kos yang Prima	051 - Layanan Publik Dit PMPU OTSKK yang Prima	A - Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	80,774,000	80,774,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
21.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	A - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat dibidang Obat Bahan Alam	73,600,000	73,600,000
22.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	052 - Pelaksanaan sertifikasi SKI / SKE kosmetik	A - Verifikasi Teknis Permohonan SKI pada Sarana Importir Produk Jadi dan Bahan Baku Kosmetika	120,980,000	120,980,000
23.	DR.4121.BAH.001 - Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Kosmetika yang Diselesaikan Tepat Waktu	051 - Pelaksanaan sertifikasi sarana produksi kosmetik	A - Penilaian Penerapan CPKB pada Industri Kosmetik dalam rangka Sertifikasi	679,652,000	679,652,000
24.	DR.4129.ABG.001 - Rekomendasi Kebijakan Keamanan, Mutu, dan Manfaat/ Khasiat Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang diselesaikan	057 - Kajian Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang diselesaikan	C - Kajian Keamanan, Mutu dan Manfaat di bidang Kosmetik	108,600,000	108,600,000
25.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	D - Evaluasi Program Kerja dan Pembahasan Aktual	314,160,000	314,160,000
26.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	053 - Peningkatan Koordinasi dalam Penguatan dan Efektifitas Penilaian Sarana dan Produk OBA OK SK	E - Monitoring dan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	575,820,000	575,820,000
27.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	A - Administrasi pelaksanaan pelayanan publik	100,386,000	100,386,000
28.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	B - Forum Konsultasi Publik	16,600,000	16,600,000
29.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	054 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	C - Peningkatan Kompetensi Petugas Layanan Publik	38,400,000	38,400,000
30.	DR.4119.BAH.001 - Keputusan Hasil Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang Diselesaikan	052 - Pelaksanaan penilaian sarana dan ekspor impor OBA, OK dan SK	A - Pemeriksaan Sarana Obat Bahan Alam, Obat Kuasi dan Suplemen Kesehatan dalam rangka Perizinan dan Pemenuhan CPOTB	307,975,000	307,975,000

02 - Nilai Pembangunan ZI Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos													90.28	1,410,491,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	-	-	B - Monitoring pelaksanaan SPIP	0	0

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
			Integritas		
2.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	052 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kosmetik	F - Pengelolaan Tim Medsos Direktorat Pengawasan Kosmetik	13,811,000	13,811,000
3.	-	-	H - Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	0	0
4.	-	-	E - Pemantapan Zona Integritas dalam rangka Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi	0	0
5.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	052 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kosmetik	E - Penguatan Implementasi Zona Integritas melalui Peran Agent of Change dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK	58,160,000	58,160,000
6.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	H - Peningkatan Kompetensi Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	39,270,000	39,270,000
7.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	G - Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	135,900,000	135,900,000
8.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	E - Pemantapan Zona Integritas dalam rangka Peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi	171,845,000	171,845,000
9.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	054 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos	C - Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	136,510,000	136,510,000
10.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	054 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos	B - Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi	41,457,000	41,457,000
11.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	B - Monitoring pelaksanaan SPIP dan Pembangunan Zona Integritas	47,602,000	47,602,000
12.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	D - Evaluasi Program Kerja	116,370,000	40,729,500
13.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	A - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Penyusunan Manajemen Risiko serta Monitoring Pelaksanaan SPIP	472,020,000	165,207,000
14.	-	-	G - Medical Check Up Pegawai Direktorat Pengawasan OT dan SK	0	0
15.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengembangan Subsite	50,000,000	25,000,000
16.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM	970,000,000	485,000,000
17.	DR.4129.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat Tradisional,	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Fasilitas Kantor	100,000,000	50,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Suplemen Kesehatan dan Kosmetik				
19.	-	-	D - Evaluasi Program Kerja	0	0
20.	-	-	C - Pemeriksaan Kesehatan Pegawai	0	0
21.	-	-	B - Pemantapan dan Internalisasi Reformasi Birokrasi	0	0
22.	-	-	A - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Penyusunan Manajemen Risiko serta Monitoring Pelaksanaan SPIP	0	0
23.	-	-	F - Pengelolaan Tim Medsos Direktorat Pengawasan Kosmetik	0	0
24.	-	-	E - Penguatan Implementasi Zona Integritas melalui Peran Agent of Change dan Internalisasi Core Value BerAKHLAK	0	0

	03 - Nlai AKIP Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos												82.24	317,328,500

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	-	-	D - Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Registrasi OT, SK dan Kos	0	0
2.	-	-	E - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	0	0
3.	-	-	B - Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	0	0
4.	-	-	A - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Penyusunan Manajemen Risiko serta Monitoring Pelaksanaan SPIP	0	0
5.	-	-	A - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	0	0
6.	-	-	C - Pengelolaan Arsip dan BMN	0	0
7.	-	-	D - Evaluasi Program Kerja	0	0
9.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	A - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Penyusunan Manajemen Risiko serta Monitoring Pelaksanaan SPIP	472,020,000	165,207,000
10.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	C - Pengelolaan Arsip dan BMN	39,300,000	39,300,000
11.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	D - Evaluasi Program Kerja	116,370,000	40,729,500
12.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat	053 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK	D - Penyusunan Laporan Tahunan Direktorat Registrasi	6,412,000	6,412,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
	Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	dan Kos	OT, SK dan Kos		
13.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	E - Monitoring dan Evaluasi Capaian Kinerja	9,455,000	9,455,000
14.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	054 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos	A - Penyusunan LAKIP dan LAPTAH	18,430,000	18,430,000
15.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	F - Operasional pengelolaan kegiatan pada satker kedeputian 2	16,848,000	16,848,000
16.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	052 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kosmetik	B - Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	41,894,000	20,947,000
17.	-	-	F - Operasional pengelolaan kegiatan pada satker kedeputian 2	0	0

04 - Nilai Kinerja Anggaran Deputi Bidang Pengawasan OT, SK, dan Kos													5	1,939,377,000

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	-	-	D - Dukungan Manajerial	0	0
2.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	C - Pemeliharaan Operasional Direktorat Pengawasan OT dan SK	55,880,000	55,880,000
3.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	B - Layanan Perkantoran	186,230,000	186,230,000
4.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	052 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kosmetik	C - Sewa Apartemen Direktur Pengawasan Kosmetik	82,500,000	82,500,000
5.	-	-	F - Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan	0	0
6.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	D - Evaluasi Program Kerja	116,370,000	34,911,000
7.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	A - Pemenuhan Keperluan perkantoran	194,590,000	194,590,000
8.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	B - Pengembangan Subsite	50,000,000	25,000,000
9.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	054 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos	D - Dukungan Manajerial	252,530,000	252,530,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
10.	-	-	D - Evaluasi Program Kerja	0	0
11.	-	-	C - Pemeliharaan Operasional Direktorat Pengawasan OT dan SK	0	0
12.	-	-	G - Penataan dan Pengelolaan BMN	0	0
13.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	052 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kosmetik	A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran	209,598,000	209,598,000
14.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	052 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kosmetik	D - Honorarium Pengelola PNBP dan BMN Direktorat Pengawasan Kosmetik	9,000,000	9,000,000
15.	-	-	B - Layanan Perkantoran	0	0
16.	-	-	D - Honorarium Pengelola PNBP dan BMN Direktorat Pengawasan Kosmetik	0	0
18.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	A - Honor Pengelola Keuangan Dit Pengawasan OT dan SK dan Satker Deputi II	7,200,000	7,200,000
19.	-	-	A - Pemenuhan Keperluan Perkantoran	0	0
20.	-	-	C - Sewa Apartemen Direktur Pengawasan Kosmetik	0	0
21.	DR.4129.CAB.001 - Sarana Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	A - Pengadaan Fasilitas Kantor	100,000,000	50,000,000
22.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	B - Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK	317,913,000	317,913,000
23.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	G - Penataan dan Pengelolaan BMN	19,575,000	19,575,000
24.	-	-	A - Honor Pengelola Keuangan Dit Pengawasan OT dan SK dan Satker Deputi II	0	0
25.	DR.4129.CAN.001 - Perangkat pengolah data dan komunikasi	051 - Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	A - Pengadaan Alat Pengolah Data Deputi II BPOM	970,000,000	485,000,000
26.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	F - Evaluasi Pertanggungjawaban Keuangan	9,450,000	9,450,000
27.	-	-	B - Layanan Perkantoran Direktorat Pengawasan OT dan SK	0	0
28.	-	-	A - Pemenuhan Keperluan perkantoran	0	0

05 - Indeks Manajemen Risiko Deputi Bidang Pengawasan														2.99	268,279,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		OT, SK, dan Kos													

NO	RO	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	ANGGARAN	KONTRIBUSI
1.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	052 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan Kosmetik	B - Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	41,894,000	20,947,000
2.	-	-	C - Pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi 9001:2015	0	0
3.	-	-	E - Penyelenggaraan Mitigasi Risiko	0	0
4.	-	-	B - Pengelolaan Sistem Manajemen Mutu Direktorat Pengawasan Kosmetik	0	0
5.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	054 - Pelaksanaan Koordinasi Standardisasi OT, SK dan Kos	E - Penyelenggaraan Mitigasi Risiko	28,200,000	28,200,000
7.	-	-	A - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Penyusunan Manajemen Risiko serta Monitoring Pelaksanaan SPIP	0	0
8.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	053 - Pelaksanaan Koordinasi Registrasi OT, SK dan Kos	C - Pengelolaan Sistem Manajemen Terintegrasi 9001:2015	19,845,000	19,845,000
9.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	051 - Pelaksanaan Koordinasi Pengawasan OT dan SK	D - Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)	57,681,000	57,681,000
10.	-	-	D - Pengelolaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi (SPIPT)	0	0
11.	DR.4129.BKB.001 - Laporan Koordinasi Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	055 - Pelaksanaan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK dan Kos	A - Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM, Penyusunan Manajemen Risiko serta Monitoring Pelaksanaan SPIP	472,020,000	141,606,000

Total	25,764,547,000

Jakarta, 26 Februari 2026

Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: ANISYAH
Jabatan	: Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: MOHAMAD KASHURI
Jabatan	: Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 26 Februari 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Direktur Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
ANISYAH	**MOHAMAD KASHURI**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL DAN SUPLEMEN KESEHATAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektifitas pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan	01 - Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT	95 Persen
		02 - Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	70
		03 - Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT	93 persen
		04 - Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	70 Persen
		05 - Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	70 Persen
		06 - Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	80 Persen
		07 - Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	80 Persen
		08 - Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	80 Persen
		09 - Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	63 Persen
		10 - Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76.5 Persen
		11 - Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83.5 Persen
2.	03 - Meningkatnya Penerapan CPOTB pada UMK OBA untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu	01 - Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing	60 Persen
3.	03 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal	09 - Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	90.4 Nilai

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		10 - Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan sesuai standar	100 Persen
		11 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	100 Persen
		12 - Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	3.03 indeks
4.	04 - Meningkatnya maturitas industri Obat Bahan Alam	04 - Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	12
5.	05 - Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	01 - Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	93.5 Persen
		02 - Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	4.94 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 5.106.210.000 (Lima Miliar Seratus Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.4119 - Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	4.303.673.000
2.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	802.537.000

Jakarta, 26 Februari 2026

Pihak Pertama
Direktur Pengawasan Obat Tradisional
dan Suplemen Kesehatan

ANISYAH

Pihak Kedua
Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional,
Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik

MOHAMAD KASHURI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: DIAN PUTRI ANGGRAWENI
Jabatan	: DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: MOHAMAD KASHURI
Jabatan	: DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA , 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK	DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK
DIAN PUTRI ANGGRAWENI	**MOHAMAD KASHURI**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
DIREKTORAT STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN, DAN KOSMETIK

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Tersusunnya standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang efektif	01 - Persentase standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100 Persentase
2.	02 - Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima	01 - Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4.96 Indeks
3.	03 - Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	89.5 Nilai
		02 - Persentase Pemenuhan Dokumen SAKIP Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	100 Persentase
		03 - Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	100 Persentase
		04 - Indeks Manajemen Risiko Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	2.95 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 4.692.517.000 (Empat Miliar Enam Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.4129 - Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	4.692.517.000

JAKARTA , 26 February 2026

Pihak Pertama
DIREKTUR STANDARDISASI OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

DIAN PUTRI ANGGRAWENI

Pihak Kedua
DEPUTI BIDANG PENGAWASAN OBAT TRADISIONAL, SUPLEMEN KESEHATAN DAN KOSMETIK

MOHAMAD KASHURI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan

Triwulan I/Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi/ Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya efektifitas pengawasan obat bahan alam dan suplemen kesehatan	Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk obat bahan alam oleh UPT	95	91.97	96.81%	100%	Capaian kinerja dengan kesimpulan baik namun terdapat rendahnya ketepatan waktu tanggapan surat tindak lanjut hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Direktur/Deputi	penyesuaian mekanisme penilaian parameter dengan mempertimbangkan efektivitas pelaksanaan pembersihan pasar yang terintegrasi dengan pemeriksaan sarana distribusi
2		Persentase keputusan hasil pengawasan produk obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	70	93.41	133.44%	100%	Capaian kinerja melampaui target karena tindaklanjut yang belum direpon pelaku usaha mash dirange SLA namun Masih terdapat laporan hasil pengujian TMS dari UPT yang tidak dapat langsung di tindaklanjuti karena hasil pengujian perlu dievaluasi lebih lanjut	1. Penguatan mekanisme evaluasi hasil pengujian TMS melalui koordinasi teknis antara Direktorat Pengawasan OTSK dengan PPPOMN untuk memastikan validitas metode, kesesuaian parameter uji, dan interpretasi hasil pengujian. 2. Peningkatan kompetensi internal tim Pengawasan mutu dalam melakukan evaluasi hasil uji UPT
3		Nilai tata kelola pengawasan sarana dan produk suplemen kesehatan oleh UPT	93	92.39	99.34%	100%	Capaian kinerja dengan kesimpulan baik rendahnya ketepatan waktu tanggapan surat tindak lanjut hasil pengawasan yang diterbitkan oleh Direktur/Deputi	penyesuaian mekansme penilaian parameter dengan mempertimbangkan efejtivitas pelaksanaan pembersihan pasar yang terintegrasi dengan pemeriksaan sarana distribusi
4		Persentase keputusan hasil pengawasan produk suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	70	100	142.86%	100%	Capaian kinerja melampaui target karena tindaklanjut yang belum direpon pelaku usaha mash dirange SLA namun Masih terdapat laporan hasil pengujian TMS dari UPT yang tidak dapat langsung di tindaklanjuti karena hasil pengujian perlu dievaluasi lebih lanjut	1. Penguatan mekanisme evaluasi hasil pengujian TMS melalui koordinasi teknis antara Direktorat Pengawasan OTSK dengan PPPOMN untuk memastikan validitas metode, kesesuaian parameter uji, dan interpretasi hasil pengujian. 2. Peningkatan kompetensi internal tim Pengawasan mutu dalam melakukan evaluasi hasil uji UPT
5		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	100%	Dihitung mulai bulan Juli 2026	
6		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	100%	Dihitung mulai bulan Juli 2026	
7		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	100%	Dihitung mulai bulan Juli 2026	

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi/ Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8		Persentase keputusan hasil pengawasan fasilitas distribusi suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	-	-	-	100%	Dihitung mulai bulan Juli 2026	
9		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan obat bahan alam yang diselesaikan tepat waktu	63	100	158.73%	100%	Capaian kinerja melampaui target karena tindaklanjut yang belum direpon pelaku usaha mash dirange SLA namun terdapat kendala terkait Semakin tajamnya target pengawasan iklan berbasis risiko sehingga proporsi di media internet menjadi sangat tinggi (79%) dan juga peningkatan proporsi klaim risiko tinggi. Hal tersebut menyebabkan banyak tersamplingnya iklan yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga jumlah iklan yang perlu ditindaklanjuti semakin meningkat tajam	Monitoring secara intensif terhadap tindak lanjut yang telah disampaikan kepada pelaku usaha
10		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan suplemen kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	76.5	100	130.72%	100%	Capaian kinerja melampaui target karena tindaklanjut yang belum direpon pelaku usaha mash dirange SLA namun terdapat kendala terkait Semakin tajamnya target pengawasan iklan berbasis risiko sehingga proporsi di media internet menjadi sangat tinggi (79%) dan juga peningkatan proporsi klaim risiko tinggi. Hal tersebut menyebabkan banyak tersamplingnya iklan yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga jumlah iklan yang perlu ditindaklanjuti semakin meningkat tajam	Monitoring secara intensif terhadap tindak lanjut yang telah disampaikan kepada pelaku usaha
11		Persentase Rekomendasi hasil pengawasan Obat Bahan Alam, obat kuasi dan suplemen kesehatan yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	83.5	61.11	73.19%	100%	1. Peningkatan jumlah surat tindaklanjut pada bulan maret sebesar 198 surat lebih dari 100% dari bulan Februari 2. Terdapat semua permintaan takedown yang dikirimkan pada bulan februari belum di tl oleh linsek karena adanya libur lebaran 3. Pelanggaran banyak ditemukan pada iklan perseorangan yang membutuhkan tindaklanjut dari lintas sektor "	1. Telah dilakukan kesepakatan dengan marketplace membahas mekanisme tindaklanjut berupa: WAG Sistem reminder melaui japri wa ataupun email 2. Perlu adanya penegasan kepada upt untuk melakukann sampling pada e-commerce official sehingga temuan tmk iklan dapat ditindaklanjuti oleh stakeholder terkait

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi/ Ketercapaian Target akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	Meningkatnya Penerapan CPOTB pada UMK OBA untuk Peningkatan Keamanan dan Mutu	Persentase UMKM OBA yang meningkat kapasitasnya untuk menghasilkan produk berdaya saing	-	-	-	100%	Dihitung mulai bulan Juli 2026	
13	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	-	-	-	100%	Dihitung pada akhir tahun	
14		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan sesuai standar	36.0	36	100.00%	100%	Tidak ada kendala dalam pemenuhan target	Pemenuhan dokumen sakip sesuai dengan target yang ditetapkan tiap bulanya
15		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	100.0	100	100.00%	100%	Tidak ada kendala dalam pencapaian target namun penolakan SPM atas kontrak MCU karena data CAN Kontrak Pengawasan tidak ditemukan	Menyusun mekanisme pengumpulan feedback pengguna layanan yang sederhana dan konsisten (misalnya QR survey, e-form, atau rating layanan).
16		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Obat Tradisional, dan Suplemen Kesehatan	-	-	-	100%	Dihitung pada akhir tahun	
17	Meningkatnya maturitas industri Obat Bahan Alam	Persentase Industri Obat bahan Alam yang ditetapkan maturitasnya dalam penerapan CPOTB terkini	-	-	-	100%	Dihitung pada akhir tahun	
18	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan yang prima	Persentase Keputusan Penilaian Sarana dan Produk Obat Bahan Alam dan Suplemen Kesehatan yang diselesaikan tepat waktu	93.5	96.21	102.90%	100%	Tidak terdapat kendala dalam upaya pencapaian target	Monitoring harian terhadap pemenuhan SLA
19		Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan	-	-	-	100%	Dihitung pada akhir tahun	

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Pengawasan Kosmetik
Triwulan I Tahun 2026

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Kendala / Hambatan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TRIWULAN I								
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan di bidang Kosmetik	Persentase keputusan hasil pengawasan produk kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	62	76,82	123,91%	118,18%	Pelaku usaha lambat dalam menanggapi/merespon surat tindak lanjut dari BPOM.	Melakukan Monitoring secara intensif terhadap rekomendasi tindak lanjut yang telah disampaikan kepada pelaku usaha
2		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana dan produk kosmetik oleh UPT sesuai ketentuan	94	94,11	100,12%	98,03%	Masih terdapat UPT dengan nilai kesesuaian hasil pengawasan di bawah nilai rata2 seluruh UPT	Melakukan monitoring dan evaluasi bulanan sebagai early warning untuk memastikan efektivitas pelaksanaan pengawasan, serta asistensi pada UPT binaan
3		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana produksi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60	100	166,67%	158,73%	Pelaku usaha lambat dalam menanggapi/merespon surat tindak lanjut dari BPOM.	Melakukan Monitoring secara intensif terhadap rekomendasi tindak lanjut yang telah disampaikan kepada pelaku usaha
		Persentase keputusan hasil pengawasan sarana distribusi kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60	100	166,67%	158,73%	Pelaku usaha lambat dalam menanggapi/merespon surat tindak lanjut dari BPOM.	Melakukan Monitoring secara intensif terhadap rekomendasi tindak lanjut yang telah disampaikan kepada pelaku usaha
		Persentase pemenuhan ketentuan oleh BUPN kosmetik yang telah diintervensi.	73	79,31	108,64%	88,12%	masih terdapat produk-produk kosmetik mengandung bahan berbahaya/dilarang dimana produk dihasilkan dari kontrak produksi	Melakukan intervensi serta pendampingan terhadap BUPN yang belum memenuhi ketentuan
		Persentase keputusan hasil pengawasan iklan kosmetik yang diselesaikan tepat waktu	60	61,59	102,65%	97,76%	Pelaku usaha lambat dalam menanggapi/merespon surat tindak lanjut dari BPOM.	Melakukan Monitoring secara intensif terhadap rekomendasi tindak lanjut yang telah disampaikan kepada pelaku usaha
		Persentase hasil pengawasan kosmetik yang ditindaklanjuti oleh Lintas Sektor	84,8	100	117,92%	116,96%	Tidak ada kendala	Perlunya dilakukan koordinasi kepada pemangku kepentingan secara berkala
	Meningkatnya Maturitas Industri Kosmetik	Persentase Industri Kosmetik yang mengikuti Program maturitas yang dapat Menerapkan CPKB secara penuh				-	- Capaian akan dilakukan pengukuran pada akhir tahun - Masih kurangnya pemahaman petugas UPT BPOM dalam tahapan proses sertifikasi - Masih kurangnya monitoring dan evaluasi oleh Ditwas - Efisiensi anggaran menyebabkan kurang optimalnya pelaksanaan program peningkatan maturitas, terutama anggaran di UPT BPOM	- perlu diadakan pelatihan internal kepada UPT BPOM dan monev secara berkala - koordinasi terkait anggaran audit oleh petugas UPT BPOM yang bertugas sebagai PIC program akselerasi
	Meningkatnya efektifitas pelayanan publik di bidang pengawasan kosmetik	Indeks Pelayanan Publik di bidang Pengawasan Kosmetik				-	Tidak ada kendala capaian akan dilakukan pengukuran pada akhir tahun	Melaksanakan monitoring terkait hasil suurvey penilaian IPP dan IPAK secara berkala
		Persentase permohonan penilaian sarana dan produk kosmetik yang di selesaikan tepat waktu	94,4	86,51	91,64%	91,06%	Potensi tidak tercapainya iku akibat adanya Lonjakan Signifikan Volume Pengajuan pada bulan jan dan feb, lonjakan pengajuan terjadi dalam waktu yang relatif bersamaan sehingga menciptakan antrian proses evaluasi.	Mempercepat proses evaluasi pengajuan permohonan sertifikasi sarana dan produk kosmetik
	Terwujudnya tatakelola pemerintah Direktorat Pengawasan Kosmetik yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Pengawasan Kosmetik				-	Tidak ada kendala capaian akan dilakukan pengukuran pada akhir tahun	Melakukan self assesment penilaian zona integritas. Melakukan monev dampak atas inovasi yang telah dilakukan.
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Direktorat Pengawasan Kosmetik	100	100	100%	100,00%	Realisasi telah melebihi target RPD yang telah di tetapkan sebesar 15%	Malaksanakan kegiatan dan percepatan pertanggung jawaban kegiatan sesuai dengan rencana PoA yang telah disusun agar realisasi sesuai dengan target RPD yang telah di susun. Berkordinasi dengan KPA / Satker terkait penyusunan RPD
		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Pengawasan Kosmetik sesuai standar	36	36,36	101,01%	36,36%	Tidak ada kendala	Melakukan penyusunan dokumen sakip sesuai ketentuan Melaksanakan monev kinerja secara berkala
		Indeks Manajemen Risiko Dit. Pengawasan Kosmetik				-	capaian akan dilakukan pengukuran pada akhir tahun	Melakukan peningkatan awarnes atau sadar risiko terhadap seluruh pegawai

Matriks Evaluasi Kinerja
Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
Triwulan I Tahun 2026

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi/ Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan kosmetik yang memenuhi persyaratan keamanan dan mutu sebelum diedarkan	Persentase obat bahan alam yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	75,4	45,98	60,98%	100%	1. Tingginya berkas carry over akibat meningkatnya permohonan registrasi/notifikasi di tahun 2025 2. Meningkatnya jumlah berkas permohonan registrasi/notifikasi setiap tahun 3. Meningkatnya kompleksitas berkas registrasi sehingga membutuhkan konsultasi dengan tim ahli	1. Desk dan intensifikasi penyelesaian berkas registrasi produk dan iklan OBA dan SK, serta Notifikasi Kosmetik 2. Penyelesaian berkas permohonan registrasi dan notifikasi melalui program zero stock dan crash program
2.		Persentase suplemen kesehatan yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	80,3	45,92	57,18%	100%	1. Tingginya berkas carry over akibat meningkatnya permohonan registrasi/notifikasi di tahun 2025 2. Meningkatnya jumlah berkas permohonan registrasi/notifikasi setiap tahun 3. Meningkatnya kompleksitas berkas registrasi sehingga membutuhkan konsultasi dengan tim ahli	1. Desk dan intensifikasi penyelesaian berkas registrasi produk dan iklan OBA dan SK, serta Notifikasi Kosmetik 2. Penyelesaian berkas permohonan registrasi dan notifikasi melalui program zero stock dan crash program
3.		Persentase kosmetik yang aman dan bermutu sebelum diedarkan	96	89,57	93,30%	100%	1. Tingginya berkas carry over akibat meningkatnya permohonan registrasi/notifikasi di tahun 2025 2. Meningkatnya jumlah berkas permohonan registrasi/notifikasi setiap tahun 3. Meningkatnya kompleksitas berkas registrasi sehingga	1. Desk dan intensifikasi penyelesaian berkas registrasi produk dan iklan OBA dan SK, serta Notifikasi Kosmetik 2. Penyelesaian berkas permohonan registrasi dan notifikasi melalui program zero stock dan crash program

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi/ Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							membutuhkan konsultasi dengan tim ahli	
4.	Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kosmetik terhadap Dokumen Informasi Produk (DIP)	Persentase keputusan penilaian Dokumen Informasi Produk (DIP) yang diselesaikan sesuai standar	53	24,41%	46,06%	100%	Masih banyaknya DIP Kosmetik yang belum sesuai standar akibat ketidakpahaman pelaku usaha kosmetik dan adanya efisiensi anggaran sehingga cakupan pengawasan menjadi lebih sedikit	1. Melaksanakan bimbingan teknis penyusunan DIP kepada pelaku usaha 2. Intensifikasi Penilaian DIP secara luring dan daring
5.	Meningkatnya regulatory assistance di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, dan notifikasi kosmetik	Persentase inovasi obat bahan alam yang didampingi sesuai standar di lingkup registrasi obat bahan alam	91	91,09%	100,10%	100%	Tidak ada kendala	Melanjutkan intensifikasi pendampingan penyusunan protokol dan evaluasi hasil uji praklinik/klinik dan menyelenggarakan webinar uji praklinik/klinik
6.		Persentase pendampingan di bidang registrasi obat bahan alam, suplemen kesehatan, notifikasi kosmetik, penilaian uji praklinik/klinik OBA, SK, dan Kosmetik, serta Penilaian DIP yang efektif	91,5	92,92%	101,55%	100%	Keberagaman karakteristik pelaku usaha dan peneliti, luasnya jangkauan sentra produksi, serta keterbatasan anggaran menyebabkan pelaksanaan pendampingan belum optimal, sehingga efektivitas pendampingan belum tercapai secara merata di seluruh wilayah	Melaksanakan kegiatan pendampingan melalui kolaborasi dengan organisasi eksternal, misalnya asosiasi pelaku usaha dan melanjutkan kegiatan OSS Registrasi OBA, SK, dan Kos secara luring dan daring
7	Layanan publik Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang prima	Indeks pelayanan publik (IPP) Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos	4,96	Realisasi pada TW IV	N/A	100%	Tidak ada kendala	Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan berdasarkan Berita Acara Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos dan melaksanakan *continuous improvement*
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Direktorat Registrasi OT, SK, dan Kos yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	91,70	Realisasi pada TW IV	N/A	100%	Tidak ada kendala	1. Melakukan monitoring dan evaluasi pembangunan ZI secara berkala 2. Melakukan internalisasi budaya kerja dan pola pikir, serta nilai

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi/ Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								BERAKHLAK kepada seluruh pegawai 3. Melakukan tindak lanjut dan evaluasi yang relevan terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik 4. Menetapkan dan mengimplementasikan kebijakan terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku 5. Mengimplementasikan pemberian reward and punishment berdasarkan capaian kinerja 6. Melakukan monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan secara berkala 7. Melakukan reviu SOP Mikro penanganan pengaduan konsumen dengan menambahkan mutu baku pada setiap proses 8. Melaksanakan monev inovasi pelayanan sesuai peta jalan inovasi 9. Melakukan monev SKM dan menyajikan hasil tindak lanjut periode sebelumnya 10. Melakukan evaluasi faktor penyebab tidak tercapainya target, rencana perbaikan, dan pemantauan realisasinya 11. Melakukan continuous improvement dalam meningkatkan kualitas pembangunan ZI
9		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	100	100	100	100%	Tidak ada kendala	Meningkatkan kedisiplinan pelaksanaan anggaran sesuai RPD dan melakukan pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi/ Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Registrasi OT, SK, dan Kos	100	36	36%	100%	Tidak ada kendala	Meningkatkan kedisiplinan penyusunan dokumen SAKIP yang sesuai standar dan tepat waktu
11		Indeks Manajemen Resiko Dit. Registrasi OT, SK, dan kos	2,99	Realisasi pada TW IV	N/A	100%	1. Pemahaman mengenai manajemen risiko sesuai Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Badan POM masih belum komprehensif, khususnya terkait pengujian aktivitas pengendalian 2. Kompetensi anggota tim manajemen risiko belum seragam karena terdapat anggota yang belum mengikuti pelatihan manrisk dari lembaga tersertifikasi. 3. Belum terdapat penyusunan roadmap rencana pengembangan kompetensi manajemen risiko untuk tahun selanjutnya. 4. Penyusunan kertas kerja penentuan risiko dilakukan setelah penyusunan risk register dan belum optimal hingga penentuan risiko residual. 5. Fokus anggota tim terbagi saat pelaksanaan desk manajemen risiko dikarenakan juga terdapat audit internal yang bersamaan dengan pelaksanaan desk manrisk. 6. Beberapa program baru belum dilakukan mitigasi risiko misal untuk inovasi I-CON belum terdapat identifikasi risikonya yang dapat terjadi sebagai contoh risiko jika terdapat perubahan peraturan terkait AKG atau kesalahan programming	1. Menyusun roadmap perencanaan pelatihan manajemen risiko berkesinambungan untuk meningkatkan kompetensi tim manrisk dan risk awareness pegawai. 2. Menyusun perbaikan kertas kerja dengan mencantumkan dasar/justikasi penetapan level kemungkinan dan dampak inheren dan residual. 3. Mengusulkan 2 anggota tim manrisk mengikuti pelatihan manajemen risiko dari lembaga tersertifikasi. 4. Melakukan reviu dan pembaruan dokumen manajemen risiko agar selaras dengan pedoman Petunjuk Pelaksanaan Manajemen Risiko di Badan POM. 5. Melakukan koordinasi intensif manrisk secara berkala dengan pimpinan, auditor internal, MR dan ketua tim kerja dan dibuktikan dalam dokumen notulen rapat. 6. Setiap perencanaan program baru perlu diidentifikasi risiko dan dilakukan pengukuran efektifitas pengendalaian berdasarkan data serta menyusun mitigasi risiko

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi/ Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
							7. Terdapat kesalahan penginputan simpulan efektivitas pengendalian daftar risiko di SAPA APIP 8. Cascading untuk indikator indeks manajemen risiko hanya untuk anggota tim Manrisk dan belum dilakukan kepada seluruh Tim Manajemen Representatif sebagai pengelola risiko yang tercantum pada SK Tim Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern (SPI). 9. Pelaksanaan deskripsi tindakan mitigasi pada menu pemantauan/reviu di aplikasi SAPAAPIP pada Semester I 2025 belum diisi.	apabila capaian tidak sesuai target. 7. Penyusunan daftar risiko selanjutnya menggunakan template excel pada SAPA APIP untuk meminimalisir kesalahan. 8. Menyertakan uraian tugas manajemen risiko pada SKP pegawai yang terlibat dalam Tim Manajemen Representatif sebagai pengelola risiko yang tercantum pada SK Tim SPI. 9. Melakukan pengisian progres atas pelaksanaan deskripsi tindakan mitigasi pada menu pemantauan/reviu secara lengkap di aplikasi SAPAAPIP secara berkala.

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Triwulan I / Tahun 2026

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode	Permasalahan	Rekomendasi
1	Tersusunnya Standar Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang efektif	Persentase standar Obat Bahan, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang disusun sesuai timeline tahapan penyusunan	100	39	39%	100%	Tidak ada kendala yang cukup berarti, rata-rata progres penyusunan melebihi target yang ditetapkan.	Melaksanakan penyusunan regulasi sesuai perencanaan
2	Layanan Publik Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik	4.96	N/A	N/A	100%	Tidak ada kendala, sedang berproses untuk tahapan penilaian IPP terkait pelaksanaan survei kepuasan pelanggan.	Menyiapkan proses penilaian IPP
3	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Direktorat Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	89.5	N/A	N/A	100%	Tidak ada kendala, pada TW I telah dilakukan pengumpukan data dukung untuk pembangunan ZI melalui pengisian LKE ZI	Melaksanakan proses penilaian ZI
4		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	36	36%	100%	Tidak ada kendala, target tercapai	Melaksanakan pemenuhan dokumen SAKIP di periode selanjutnya
5		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	100	75	75%	100%	Tidak ada kendala, target tercapai	Melaksanakan pengelolaan anggaran secara efisien
6		Indeks Manajemen Risiko Dit. Standardisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	2.95	N/A	N/A	100%	Tidak ada kendala, saat ini sedang berproses untuk penyusunan daftar risiko.	Mempersiapkan pelaksanaan penilaian manajemen risiko

Matriks Evaluasi Kinerja Direktorat Pemberdaynaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik
Triwulan I / Tahun 2026

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target	Realisasi	Capaian	Proyeksi Ketercapaian Target Akhir Periode Renstra	Permasalahan	Rekomendasi
1	Meningkatnya pengetahuan dan pemberdayaan masyarakat di bidang obat bahan alam, suplemen kesehatan dan kosmetik	Persentase Penyuluh/Kader/Duta OBA, SK dan Kos aman yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat	100	5.1	5.10%	100%	Tidak ada kendala dalam pemenuhan target	Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya secara intensif dan berkala
2		Persentase pemberdayaan pelaku usaha dan masyarakat di bidang OBA, SK, Kos yang dilakukan oleh UPT sesuai pedoman	71	5.6	7.89%	100%	Tidak ada kendala dalam pemenuhan target	Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya secara intensif dan berkala
3	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dalam penerapan CPOTB dan CPKB oleh UMKM	Persentase fasilitator yang dibina untuk melakukan pendampingan kepada UMKM OBA dan Kos	77	4.2	5.45%	100%	Tidak ada kendala dalam pemenuhan target	Melakukan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaannya secara intensif dan berkala
4	Layanan Publik Dit. PMPU OTSKK yang Prima	Indeks Pelayanan Publik Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha OT, SK, Kos	4.89	N/A	N/A	100%	Dihitung akhir tahun	-
5	Meningkatnya peran serta pemerintah daerah dalam melaksanakan pemberdayaan keamanan jamu secara aktif	Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan UMKM OBA	0.9	N/A	N/A	100%	Dihitung mulai bulan Juli	-
6		Persentase Kabupaten/Kota yang melakukan pemberdayaan Masyarakat di bidang OBA	0.9	N/A	N/A	100%	Dihitung mulai bulan Juli	-
7	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik	90.63	N/A	N/A	100%	Dihitung mulai bulan Juni	-
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah yang optimal	Nilai Pembangunan ZI Dit. PMPU OT, SK, Kos	87.92	N/A	N/A	100%	Dihitung akhir tahun	-
9		Persentase pemenuhan dokumen SAKIP PMPU OT, SK, Kos sesuai standar	100	36	36%	100%	Tidak ada kendala dalam pemenuhan target	Pemenuhan dokumen sakip sesuai dengan target yang ditetapkan tiap bulannya
10		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Dit. PMPU OT, SK, Kosk	100	75	75%	100%	Tidak ada kendala dalam pemenuhan target	Pelaksanaan kegiatan sesuai POA dan RPD
11		Indeks Manajemen Risiko Dit. PMPU OT, SK, Kos	2.85	N/A	N/A	100%	Dihitung akhir tahun	-

BADAN POM

1500533
HALOBPOM

BPOM
Jl. Percetakan Negara No.23
Jakarta Pusat 10560
02142484208
deputi2@gmail.com
@deputi2badanpom